

Hujan Batu Buruh Kita

Kumpulan Liputan Perburuhan

Hujan Batu Buruh Kita

Kumpulan Liputan Perburuhan

© AJI Indonesia

Editor. Wahyu Dhyatmika

Desain. J!DSG, www.jabrik.com

Foto cover. Afriadi Hikmal

Cetakan Pertama: Desember 2009

Diterbitkan oleh:



AJI INDONESIA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang-Senen

Jakarta Pusat 10420 – Indonesia

Tel. +62 21 3151214, Fax. +62 21 3151261

www.ajiindonesia.org

Didukung oleh:



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**



Daftar Isi

Kata Pengantar

Ketua Umum

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 5

Country Program Director

Solidarity Center Indonesia Office 9

Direktur Perwakilan

Friedrich Ebert Stiftung Indonesia 11

Deputy Director/Officer in Charge

ILO Office for Indonesia and Timor Leste 14

Pentingnya Buruh Bersatu 17

Para Buruh Media Yang Terlupakan 19

Sorry, No Day Off 27

Jungkir Balik Dengan Upah Minimum 29

Hujan Batu Di Negeri Orang 35

Yang Terjepit Jatah Preman dan Jawara 49

Every Little Helps 55

Nasib Sang Pelinting 57

Mengangkat Derajat Pramuwisma 71

Janji Kosong ke Korea 77

Si Tono Pencetak Batubata Pekerja Anak 97

Sekolah Kosong di Soe 99

Living Merapi 109

Fashion Victims 111



Kata Pengantar

Ketua Umum

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

BURUH adalah tema pinggiran dalam laporan media massa kita. Kelas sosial maha penting ini kerap dimunculkan dalam potretnya yang nestapa. Sering kita saksikan di televisi, kamera menangkap pemandangan ini: bilik-bilik sempit dan becek, asap pabrik dan getar mesin. Gurauan pahit diselengi musik dangdut.

Kita menyaksikan para buruh itu bergerak menuju pabrik. Mungkin dengan kesaradan yang kurang, bahwa mereka adalah alas dunia. Bahwa pada mereka lah ekonomi kita bersandar. Bahwa upah murah mereka telah menggoda pemilik modal, global maupun nasional, dengan gairah investasi meluap-luap. Bahwa hidup mereka tetap melarat, meskipun pabrik gencar melahirkan barang-barang. Di balik dinding pabrik, ada pemilik modal dengan saku kian tebal.

Media kadang juga luput memotret kehidupan buruh itu dengan mata lebih tajam. Kelas pekerja ini, bagian mayoritas dari rakyat Indonesia, misalkan harus menanggung berbagai kebijakan dari kekuasaan yang tak memihak mereka. Di parlemen, nyaris tak ada partai berdiri tegak membela kepentingan buruh, meski reformasi politik membuka peluang.

Para buruh kerap menjadi statistik. Angka-angka berderet. Tapi, tak tertangkap apa yang ada di baliknya: cerita tentang kerja produksi dengan keringat, dan air mata. Pada 2001, wartawan Inggris John Pilger memotret kehidupan buruh, setelah Indonesia keluar dari kediktatoran orde baru. Laporan itu ditulisnya sebagai buku bertajuk 'The New Rulers of the World'. Dia juga membuat film dokumenter yang menggugat, dengan judul sama.

Pilger bercerita tentang Indonesia sebagai contoh dari globalisasi, tentang negeri yang pernah disebut murid terbaik Bank Dunia, sampai ekonomi kita yang telah 'terglobalisasi' itu luluh lantak pada krisis 1998. Globalisasi membuat dunia kian kecil: keputusan investasi di New York bisa membuat buruh di Indonesia menganggur. Keputusan para pemilik kapital di London, dapat membuat Korea Selatan banjir order besar.

Tapi, kehidupan buruh toh tak banyak berubah, meski sepatu Nike yang dipakai bintang Hollywood Brad Pitt saat dia lari pagi, bisa jadi buatan tangan Ujang di Tangerang. Para buruh tetap hidup dalam keadaan serba kurang, tanpa mengerti bagaimana mengolah tenaga dan perannya yang besar mengubah wajah dunia.

Di sinilah jurnalisme punya peran penting. Para wartawan, yang juga bagian dari kelas pekerja di industri media, tak hanya mencatat dan melaporkan kehidupan dan dinamika kelas pekerja. Jurnalisme bertanggungjawab membuat kehidupan kelas pekerja lebih baik, dengan memeriksa kembali kebijakan, atau mungkin kritik buat penguasa yang telalu memihak kaum pemodal.

Kita bisa menoleh kepada soal berikut: masih ada problem pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada pengusaha kabur menelantarkan pekerja. Ada masalah pekerja migran, membengkaknya lapangan kerja informal dengan pendapatan dan produktivitas rendah. Lalu para pekerja bekerja tanpa perlindungan sosial, sampai maraknya aksi protes atas sistem kerja kontrak, *outsourcing* hingga *union busting*.

Sejak krisis finansial global di ujung 2008 dan berlanjut sampai 2009, catatan itu bertambah panjang. Berdasarkan data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, telah terjadi 51.000 kasus pemutusan hubungan kerja. Angka dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lebih tinggi: 237.000 kasus PHK pada Oktober 2008-Maret 2009. Mereka adalah para buruh di sektor tekstil dan garmen, perkebunan kelapa sawit, industri otomotif, konstruksi, dan sepatu.

Tenaga kerja subkontrak (*outsourcing*), lepas dan temporer tercatat menjadi kelompok yang paling rentan terkena PHK secara massal. Mereka termasuk 250.000 pekerja migran asal Indonesia yang terkena PHK dan terpaksa pulang kampung sebelum kontrak berakhir. Pada Desember 2008, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), mencatat pekerja migran kita sekitar 5,8 juta. Sekitar 65 persen, kata Badan itu, nekat pergi tanpa dokumen resmi.

AJI juga mencatat masih banyak pekerja media hidup memprihatinkan. Pada situasi krisis, yang menjadi satu soal serius, adalah tak adanya standar pengupahan wartawan. Ada media mampu memberi upah besar, tapi lebih banyak yang tidak. Tentu, ada dampak berantai dari rendahnya upah itu. Salah satunya, sulit berharap wartawan bekerja secara baik di tengah kondisi kesejahteraan yang buruk.

Menyadari soal itu, AJI menggelar lomba karya jurnalistik perburuhan ini. Bersama American Center for International Labor Solidarity (ACILS), International Labour Organization (ILO) serta The Friedrich Ebert Stiftung (FES), AJI hendak menarik perhatian media, dan juga jurnalis, melaporkan sektor perburuhan yang penting ini dengan lebih intens, dan berkualitas.

Kegiatan ini sudah pernah dilaksanakan tahun lalu. Pada tahun ini tampak pertambahan peserta, yang bisa diartikan sebagai antusiasme wartawan atas soal perburuhan. naskah yang masuk lebih banyak di bandingkan tahun lalu. Tahun ini, masuk sekitar 85 karya kategori

Hujan Batu Buruh Kita Kumpulan Liputan Perburuhan

cetak, 13 kategori televisi, 33 foto, dan 18 karya jurnalistik radio. Total seluruhnya 149 karya.

Karya terpilih dalam lomba ini merekam masukan penting bagi siapa saja yang ingin memperbaiki kondisi kelas pekerja, dan memimpikan Indonesia sejahtera. Ia bisa jadi memantik ilham, atau kehendak mengubah apa yang buruk menjadi lebih baik di masa depan. Dalam misi ini, jurnalis tak hanya berperan memotret realitas, tapi turut mengajak pembacanya mencari jalan keluar.

Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2009

Nezar Patria

Kata Pengantar

Country Program Director

Solidarity Center Indonesia Office

SATU pengalaman praktik terbaik yang dicatat oleh Solidarity Center dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif media baru sekaligus mempromosikan peran pekerja dan jurnalis di sebuah negara adalah melalui lomba karya jurnalisme terkait isu kerja dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2008, Solidarity Center kantor Indonesia (melalui program yang didukung NED-National Endowment for Democracy) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES) untuk menggagas dan mensponsori sebuah lomba dengan topik pekerjaan, pekerja, dan isu-isu ketenagakerjaan di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya berhasil menyoroti peran buruh dalam perekonomian Indonesia dan masyarakat tetapi juga memberikan AJI sebuah platform untuk mempromosikan upayanya untuk mendukung hak-hak jurnalis.

Dengan tujuan untuk meningkatkan cakupan pekerja dan serikat pekerja di media, dan untuk membangun dukungan bagi standar jurnalisme di Indonesia, Solidarity Center kantor Indonesia melanjutkan kerja sama dengan AJI dan FES untuk melakukan kompetisi "putaran kedua". Dalam lomba tahun 2009 ini, ILO kantor Jakarta juga

memberikan dukungan dana.

Kerjasama kali ini juga termasuk rangkaian empat lokakarya, yang dilakukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat; di Batam, Kepulauan Riau; di Malang, Jawa Timur dan di Jakarta untuk mempromosikan dan memperluas tujuan kompetisi dan mempromosikan hak-hak buruh dalam liputan jurnalistik serta mendidik wartawan dan editor mengenai isu-isu kunci perburuhan.

Pada lomba tahun 2009 ini, kategori foto mertupakan kategori baru yang dilombakan, selain kategori cetak, *online*, radio dan televisi. Total 149 karya yang masuk ke AJI (85 cetak/online, 18 radio, 13 tv dan 33 foto) telah membuktikan bahwa jurnalis dan media telah menyediakan ruang yang signifikan bagi isu perburuhan di liputan dan reportasenya, sebagai cara untuk mengkomunikasikan cerita-cerita pekerja ke audien yang luas.

Terimakasih kami sampaikan kepada kawan-kawan jurnalis baik cetak, *online*, radio, televisi dan foto serta media yang telah bersedia mengikutkan karyanya pada lomba ini. Tanpa mereka, lomba ini mungkin tidak akan pernah terlaksana.

Selamat kami sampaikan kepada para pemenang. Dengan lomba seperti ini, diharapkan kampanye melalui media massa tentang hak-hak dasar pekerja dan isu-isu ketenagakerjaan lain menjadi lebih semarak. Masyarakat luas dan terutama pengusaha, pemerintah, legislatif serta penegak hukum ketenagakerjaan jadi lebih memahami persoalannya. Dan semakin terbuka pula peluang dan ruang bagi pekerja dan serikat pekerja untuk lebih didengar oleh semua pihak.

Jakarta, Desember 2009

James A. Davis

Kata Pengantar Direktur Perwakilan Friedrich Ebert Stiftung Indonesia

Friedrich-Ebert-Stiftung atau FES adalah yayasan politik Jerman yang berkomitmen terhadap ide dan nilai-nilai demokrasi sosial atau sosdem. FES sangat dekat hubungannya dengan Partai Sosial Demokrasi di Jerman (SPD) dan gerakan serikat buruh di Jerman. Lebih lanjut lagi, di dalam pernyataan misi yayasan kami, saat pendiriannya di tahun 1924, sejak 85 tahun yang lalu, tercantum bahwa FES harus mempromosikan kebebasan dan independensi media sebagai salah satu dari elemen terpenting bagi sistem demokrasi yang kuat.

FES merasa sangat penting mendukung “Anugerah Karya Jurnalistik Terbaik untuk Peliputan Isu Perburuhan 2009” dan penerbitan buku kompilasi karya-karya terpilih ini karena masalah ketenagakerjaan/perburuhan adalah isu yang sangat penting di negara ini, dimana Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan terkait lainnya, dianggap masih lebih pro pengusaha dan tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja/buruh. Di Indonesia, para pekerja lebih dianggap sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan bukan sebagai satu kelas budaya dan sosial. Padahal pembangunan di Indonesia tidak dikendalikan oleh akademisi atau

politikus, melainkan dibangun oleh kerja keras para buruh, petani, nelayan dan sangat banyak di antara mereka adalah perempuan. Jurnalis pun mengalami masalah yang sama seperti halnya kaum buruh di sektor informal, sebagai contoh mereka juga masih menuntut upah layak, seperti yang dikampanyekan oleh AJI.

Tetapi di dalam literatur, budaya dan juga media, isu-isu perburuhan dianggap kurang populer. Padahal bila disadari, sebenarnya dengan kelangkaan media dalam meliput isu perburuhan ke permukaan akan mengakibatkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia menjadi isu yang samar-samar dan kurang diketahui masyarakat luas.

Oleh sebab itulah Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Indonesia bekerjasama dengan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), International Labour Organization (ILO) dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) menganggap perlu melaksanakan kegiatan kompetisi - bagaimana media memberitakan atau meliput masalah ketenagakerjaan – sekaligus penerbitan karya – karya yang masuk nominasi, dengan harapan bahwa dunia para buruh dan kehidupan orang-orang biasa akan memiliki tempat lebih banyak dan lebih relevan di dalam media itu sendiri, sejalan dengan pentingnya kesejahteraan di Indonesia. Disamping sebagai sarana informasi dan edukasi tidak hanya bagi buruh/pekerja dan serikat-serikat pekerja itu sendiri tetapi juga para pemerhati masalah buruh dan ketenagakerjaan serta pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumnya.

Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, maka akan semakin banyak media yang secara terus menerus dan serius, sejalan dengan standar profesionalisme dan kode etik jurnalistik, meliput/melaporkan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan/perburuhan, sehingga lebih menumbuhkan minat masyarakat yang semakin luas untuk lebih peduli pada masalah tersebut serta akan mempermudah proses kerja pembuat kebijakan-kebijakan pekerja secara lebih menyeluruh.

KATA PENGANTAR

Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada media-media yang telah mengirimkan karyanya untuk dinilai para juri, dan selamat untuk para pemenang. Semoga kompetisi dan publikasi ini bermanfaat dan bermakna bagi dunia jurnalisme dan pekerja/buruh di Indonesia. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada AJI, ACILS dan ILO atas kerjasama baiknya, secara khusus bagi Para Juri yang telah bekerja keras selama proses penilaian karya-karya yang masuk ke panitia, dalam kurun waktu yang boleh dikatakan sangat singkat.

Akhir kata, kami ucapkan selamat bagi para Pemenang Lomba dan selamat membaca kompilasi ini.

Jakarta, Desember 2009

Erwin Schweisshelm

Kata Pengantar **Deputy Director/Officer in Charge** **ILO Office for Indonesia and Timor Leste**

PASAL 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk secara bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi; termasuk kebebasan memegang teguh pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide-ide melalui setiap media, tanpa adanya hambatan.

Media memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesadaran dan memenuhi tanggung jawabnya dalam mempromosikan terbitan isu-isu sosial dan pendidikan. Media juga harus mempertimbangkan dan mencegah efek-efek yang membahayakan dari isu-isu sosial dan budaya, dan mendorong masuknya masuknya isu-isu sosial. Industri media dan komunikasi adalah sektor terdepan dalam memfasilitasi globalisasi. Sangat tidak bisa dibayangkan bagaimana arus dan kedalaman globalisasi dapat bertahan dalam beberapa decade terakhir ini tanpa adanya jaringan telekomunikasi yang canggih.

FES, ACILS dan ILO bekerjasama dengan AJI menyelenggarakan serangkaian lokakarya bagi jurnalis-jurnalis di Indonesia di empat kota: Mataram, Batam, Malang dan Jakarta untuk mempromosikan

sensitifitas jender dan advokasi ketenagakerjaan dalam liputan jurnalistik, khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja. Setelah lokakarya tersebut, Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan dilaksanakan untuk kedua kalinya untuk memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang telah mengadvokasi dan mempromosikan isu-isu perburuhan yang membantu pekerja, pengusaha dan pemerintah memahami lebih baik hak-hak dan kepentingan masing-masing pihak untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia.

Kami juga ingin memberikan selamat kepada para pemenang penghargaan dari kategori media cetak/online, televisi, radio dan foto. Media memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan dan program sosial dan ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi kepentingan langsung dari konstituen utama ILO – pemerintah, pekerja dan pengusaha, dan kesuksesan tujuan tersebut hanya bias dicapai dengan keterlibatan dan dukungan dari seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan khususnya lembaga riset dan pendidikan serta media. Di Indonesia, daftar prioritas kebijakan ketenagakerjaan mencakup isu-isu mengenai pengurangan pengangguran, pekerja migrant dan rumah tangga, investasi asing, PHK massal dan outsourcing, memastikan pelaksanaan yang efektif dari perundang-undangan ketenagakerjaan, mengurangi dan menyelesaikan perselisihan perburuhan, meningkatkan perjanjian kerja bersama dan dialog social untuk perbaikan daya saing, efisiensi, kesejahteraan dan keadilan social. Kami memahami bahwa isu-isu tersebut cukup banyak diliput oleh media. ILO senantiasa melibatkan media dalam setiap kegiatannya sebanyak mungkin memastikan bahwa media terinformasikan mengenai perkembangan ketenagakerjaan pada tingkat local dan global.

Akhirnya ILO mendorong media untuk memberikan liputan yang lebih penting mengenai isu-isu perburuhan yang melibatkan seluruh

Hujan Batu Buruh Kita Kumpulan Liputan Perburuhan

pengusaha dan angkatan kerja didalam negeri misalnya dengan menugaskan jurnalis penuh waktu karena media memiliki peranan vital dalam mempromosikan pembangunan nasional melalui kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan keadilan sosial untuk mencapai pekerjaan yang layak untuk semua.

Jakarta, Desember 2009

Peter van Rooij



Pentingnya Buruh Bersatu

Oleh. Danu Kusworo

Memperingati Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh se-Jabodetabek berjalan kaki dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara, Jumat (1/5). Selain memperjuangkan aspirasi buruh, seperti penghapusan outsourcing dan penyediaan lapangan kerja, mereka juga menuntut pemerintah peduli akan nasib kaum buruh.

Pemenang III kategori foto "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Foto sudah pernah dipublikasikan di Harian Kompas tanggal 2 Mei 2009.



NASIB BURUH DI SEKTOR MEDIA Para Buruh Media Yang Terlupakan

Oleh. Muhammad Subhan (HARIAN HALUAN PADANG)

Kesejahteraan pekerja di sektor media seringkali diabaikan pemilik modal. Mereka seringkali lupa memperjuangkan nasib sendiri.

ABDUL MULUK (43), bukan nama sebenarnya, sudah hampir tiga tahun menjabat Kepala Bagian Humas di salah satu Pemerintahan Kabupaten di Sumatera Barat. Sepanjang masa tugasnya itu, dia kerap kali mengeluhkan ulah segelintir oknum wartawan yang sering merongrongnya. Berulang kali, ada saja oknum wartawan yang tidak dia kenal, mengajukan protes macam-macam. Selidik punya selidik, mereka ternyata berasal dari media mingguan yang namanya pun tak dia kenal. Yang lebih parah, para "wartawan" ini tidak mengantongi kartu pers maupun surat tugas.

Di bagian humas yang dia pimpin, Abdul Muluk melayani kebutuhan informasi untuk tak kurang dari 70-an wartawan dari berbagai media, baik cetak, online, televisi dan radio. Pengamatan Muluk, sebanyak wartawan yang terdaftar sebanyak itu pula ulahnya.

Terus terang dia mengaku kalau pemerintah daerah menyediakan sekadar honor pemberitaan setiap bulan, khususnya bagi wartawan yang menulis berita tentang aktivitas pemerintahan di kabupaten

itu. Penerima honor tentunya wartawan yang terdaftar dengan bukti kepemilikan kartu pers atau surat tugas serta jelas asal medianya.

Namun tak jarang bagian humas terkendala anggaran, hingga terlambat mencairkan 'jatah preman' untuk para wartawan ini. Keterlambatan ini seringkali menjadi bumerang dan berbuntut panjang. Beberapa oknum wartawan tak mau tahu dan cepat-cepat menyalahkan humas. Mereka seringkali main tuding kalau Abdul Muluk sudah menggelapkan dana untuk wartawan. Tak berhenti di sana, beberapa oknum wartawan malah menulis tuduhan bernada miring itu di medianya. Akibatnya, Muluk sering kena marah bupati.

Itu baru soal jatah sogokan bulanan. Belum lagi persoalan proposal ini-itu yang diajukan sejumlah oknum wartawan. Ada proposal perjalanan jurnalistik, proposal ulang tahun media tempatnya bekerja, proposal bantuan uang kuliah, dan macam lainnya. Pokoknya segala macam cara dipakai untuk merampok anggaran pemerintah.

Kalau bagian humas mengaku tak punya pos anggaran terkait proposal dimaksud, bukan main murkanya para wartawan ini. Abdul Muluk tak jarang merasa diperas oleh perilaku oknum wartawan macam itu. Dampaknya, terjadi ketidakharmonisan hubungan antara wartawan dan humas di kabupaten itu.

Muluk pun iseng-iseng menengok pengalaman koleganya di kabupaten tetangga. Eh ternyata kisah mereka pun serupa.

Sudah sebegitu burukkah kondisi kesejahteraan wartawan di Sumatera Barat, hingga para kuli tinta yang terhormat ini merendahkan diri jadi tukang peras?

PENGALAMAN yang menimpa Muluk tersebut tentu saja mengejutkan komunitas jurnalis di mana pun yang masih menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia. Namun kita tidak

bisa menutup mata terhadap realita yang terjadi itu. Dibilang tidak ada tentu munafik kita. Dibilang ada 'kawan-kawan' itu, perbuatannya benar-benar sungguh sangat memalukan dan mencoreng nama baik wartawan.

Menyikapi keadaan yang tidak sehat itu, Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara dalam kesempatan berbicara pada seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2009 di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, 9 Februari 2009 lalu mengutip tulisan wartawan senior Rosihan Anwar yang mengatakan 80 persen wartawan adalah "pemeras". Namun kata Leo, biasanya yang diperas adalah para pemeras juga!

Beberapa situs berita di internet mengutip pernyataan Leo itu. Dan, apa yang diungkapkan Leo Batubara cukup beralasan. Dia juga menunjuk kenyataan bahwa pasca reformasi di Indonesia 1998 silam, jumlah wartawan meningkat tajam seiring menjamurnya jumlah penerbitan pers yang kini tak perlu pusing mengurus izin terbit. Asal ada duit apapun nama medianya dalam waktu singkat bisa terbit.

Banyaknya media baru itu dengan sendirinya membutuhkan wartawan-wartawan baru pula. Kalau dulu orang tak semudah membalik telapak tangan menjadi wartawan, maka sekarang seiring menjamurnya media, siapapun bisa menjadi wartawan. Bisa dikata, seorang preman pasar sekalipun. Kalau dulu orang membutuhkan pendidikan karir jurnalistik berjenjang, sekarang orang tak bersekolah pun bisa jadi wartawan asal punya lobi dengan pimpinan perusahaan pers dan punya potensi menguntungkan perusahaan.

Karena semakin mudahnya menjadi wartawan tak heran pula lahir oknum-oknum wartawan "preman" berjiwa pemeras seperti diungkapkan Leo Batubara. Lalu dunia wartawan pun diselimuti para "preman" yang mengancam kredibilitas pers dan nama baik wartawan yang profesinya diletakkan sebagai pilar keempat demokrasi.

Perkembangan jumlah media massa di era reformasi memang mengalami lonjakan luar biasa dibanding era Orde Baru. Dari berbagai

sumber disebutkan bahwa selama 32 tahun era Orde Baru, hanya sempat berdiri 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio. Sementara, setahun pasca reformasi jumlah media cetak melonjak menjadi 1.687 penerbitan atau bertambah enam kali lipat. Jika dihitung dengan skala waktu, berarti setahun pasca reformasi telah lahir 1.389 media cetak baru, atau 140 per bulan atau hampir lima media per hari.

Memang, pada 2008 lalu, muncul tren berbeda. Jumlah media cetak itu mulai berkurang dan tercatat sebanyak 830, televisi menjadi 60 media, dan radio dengan izin menjadi 2.000 media. Sedangkan radio tanpa izin melonjak jadi 10 ribu media. Naiknya jumlah media, membuat jumlah wartawan juga meroket. Menurut Dewan Pers, jumlah wartawan saat ini mencapai 40 ribu orang.

Anggota Dewan Pers Wikrama Iryans Abidin, menilai melonjaknya jumlah media massa pasca reformasi tidak bisa dilepaskan dari proses liberalisasi pers sejalan dengan pergeseran dari sistem politik otoriter ke demokrasi. Namun, dia menengarai dari sekitar 40 ribu wartawan Indonesia, hanya 20 persen atau sekitar 8.000 orang saja yang paham dengan Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40/1999 tentang Pers. Ini menunjukkan bahwa saringan masuk ke profesi wartawan sungguh begitu longgar. Semua bisa jadi wartawan tanpa kompetensi dan kompetisi, bahkan tanpa etika dan moral. Modalnya cukup kartu pers.

Banyaknya wartawan, menurut Wikrama, tidak terlepas dari kondisi negara yang krisis. Cari kerja sulit, dan akhirnya banyak yang jadi wartawan untuk sekedar menumpang hidup dan mencoba terus bertahan. Di lain sisi banyak penerbitan pers yang belum mampu menyejahterakan para wartawannya dengan gaji yang layak. Kondisi ini, tentu saja, membuat kita harus merenung, akankah marwah pers di mata publik tetap baik?

BISA dikatakan, pasca reformasi bertumbuhan lembaga pers “yang tidak sehat” secara finansial. Buktinya, temuan di lapangan, banyak wartawan tidak bergaji memadai, khususnya wartawan yang bekerja di media mingguan. Bukan itu saja, mereka juga dibebankan tugas menjual koran, mencari iklan/pariwara yang dianggap sebagai sikap loyal kepada perusahaan media tempat mereka bekerja.

Akal sehat mengukur, kerja yang tidak memiliki gaji tetap tentu akan menumbuh sikap ‘nakal’ oknum wartawan di lapangan. Yang mereka butuhkan cuma kartu pers (*id card*) yang menjadi senjata andalan setiap kali menghadapi kesulitan. Tak soal bagi oknum-oknum itu ada berita atau tidak, yang jelas bagi mereka bisa mendapatkan akses masuk ke pintu pejabat juga ke instansi vital lainnya yang kira-kira ‘basah’ dan bisa menguntungkan hidup mereka.

Di samping fenomena “wartawan pemeran” itu, juga penting disikapi masalah krusial yang dihadapi sejumlah wartawan yang bekerja di media yang bisa dikatakan eksis namun kurang mampu menyejahterakan wartawannya. Wartawan setiap waktu dituntut bekerja profesional, tak kenal pagi, siang, sore maupun tengah malam, asal mampu mendapatkan berita-berita terbaru dan beda dari koran lainnya. Rutinitas kerja wartawan tak kenal waktu dengan pendapatan minimalis tersebut muncul istilah baru di kalangan wartawan sendiri; “buruh media”.

Pertanyaannya, sesuaikah profesi wartawan disamakan dengan buruh? Menjawab pertanyaan ini kita tentu harus pahami dulu definisi “buruh”, yang menurut UU Nomor 13 Tahun 2003; “Buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Jadi pada dasarnya, semua yang bekerja (baik di perusahaan/ luar perusahaan) dan menerima upah atau imbalan adalah “buruh”. Kalau demikian tidaklah salah pekerjaan sebagai wartawan disebut pula buruh karena mereka menerima imbalan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Namun persoalannya para “buruh media” ini umumnya tidak mendapatkan imbalan layak sebagaimana pekerja profesional lainnya. Tidak sedikit wartawan yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Regional/Provinsi. Anehnya, setiap kali peringatan Hari Buruh mereka menulis tentang nasib para buruh yang belum mendapatkan hak sewajarnya. Namun jarang ada wartawan yang berani menulis nasibnya sendiri di hari buruh itu.

Umumnya, untuk memperjuangkan nasib wartawan di media-media yang “sedikit sehat” ada namanya serikat pekerja. Namun agaknya minim di antara serikat pekerja yang dibentuk itu benar-benar memperjuangkan nasib anggotanya. Padahal berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan definisi tentang serikat pekerja, yaitu: “Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Organisasi profesi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, dan lainnya juga tidak punya wewenang terkait persoalan gaji wartawan itu. Persoalan gaji adalah wewenang penuh perusahaan media bersangkutan. Tapi organisasi profesi wartawan masih punya tanggung jawab moral mengingatkan perusahaan-perusahaan media untuk terus meningkatkan upah standar kesejahteraan wartawan.

Dewan Pers sendiri saat ini sedang berusaha membuat standarisasi perusahaan media. Dengan demikian diharapkan wartawan yang dipekerjakan perusahaan media adalah mereka yang profesional dan dapat menjaga citra serta martabat profesi jurnalismenya. Tentu saja perusahaan media dimaksud harus memegang komitmen dengan meningkatkan pendapatan wartawan mereka.

Di samping itu, selama ini, yang sering dianaktirikan adalah wartawan-wartawan yang bekerja di daerah namun berkantor pusat di Jakarta. Wartawan daerah seringkali tidak tahu harus menyampaikan nasib mereka kepada siapa. Selain status tidak jelas mereka pun seolah dianggap wartawan lepas saja yang diperlukan dikala benar-benar butuh.

Layaknya nasib buruh-buruh lainnya, persoalan yang dihadapi para “buruh media” ini tak habis-habisnya diperbincangkan meski jarang ada yang menuliskan. Namun bukan berarti semua pihak harus diam dan acuh tak acuh. Mereka adalah kaum intelektual yang turut menentukan arah maju mundurnya peradaban bangsa. (*)

Nominasi kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah ini pernah dipublikasikan di Harian Haluan, Padang pada tanggal 6 November 2009





Sorry, No Day Off

Oleh. Afriadi Hikmal

Buruh sedang menjahit dan menyortir pakaian di pabrik garmen di Jakarta. Baik pemerintah maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia telah memberikan libur bagi para pekerja di Indonesia, selama satu hari pada tanggal 1 Mei untuk memperingati hari Buruh Internasional.

Nominasi kategori foto "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Foto sudah pernah dipublikasikan di Jakarta Globe edisi 2/3 Mei 2009



UPAH LAYAK BURUH

Jungkir Balik Dengan Upah Minimum

Oleh. Ayu Prawitasari (SOLO POS)

Buruh di Sukoharjo, Jawa Tengah, mencoba bertahan hidup dengan upah jauh di bawah standar kehidupan layak. Dewan Pengupahan pun tak berdaya.

PEREMPUAN kurus dengan rambut ikal sebahu itu menatap saya dengan pandangan kosong. Saya berkunjung ke kamar kontrakannya, ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi. Namun, matanya yang merah dan suaranya yang parau menandakan dia baru saja terjaga dari tidur lelap. “Mari masuk,” katanya kemudian.

Sebut saja dia Yanti. Perempuan 37 tahun, janda, dengan ijazah sarjana ilmu administrasi dari sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sejak tiga tahun lalu, dia menjadi buruh di pabrik plastik, di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Di kamarnya yang sempit --2 x 3 meter, berubin hitam kusam-- ruang tamu, ruang tidur dan ruang santai menonton teve, tumpang jadi satu. Sisa ruangan kecil berukuran 1 meter persegi di belakang, dipakai jadi dapur dan sedikit kamar mandi.

Di dinding kamar tidurnya yang bercat putih, ada foto-foto Yanti dalam berbagai pose: fotonya saat remaja, bersama keluarga dan satu foto kenangan yang amat dia banggakan. Dengan toga dan ijazah di

tengah, Yanti tersenyum lebar di foto itu.

Kami lalu mengobrol panjang.

Selepas kuliah, Yanti mesti mengambil pilihan pahit. Minimnya lowongan pekerjaan membuat dia akhirnya harus bertahan hidup sebagai *inner*. Pekerjaannya memasukkan plastik ke dalam karung.

"*Inner* itu statusnya bukan karyawan tetap, bukan pula karyawan kontrak. Kami kerjanya borongan. Dengan target minimal memasukkan 1.000 plastik ke dalam karung per hari, perusahaan memberi upah Rp 12 ribu," tuturnya.

Dalam satu bulan, total upah yang biasa dikantonginya cuma Rp 300 ribu. Beberapa kali, Yanti mengaku sempat pindah bekerja di perusahaan lain. Dia merantau sampai Ibukota. "Saya pindah kerjaan untuk bertahan hidup, juga harus ikut suami," katanya. Setelah bercerai, Yanti kembali ke Sukoharjo dan terdampar lagi di pabrik plastik ini.

Tiga tahun jadi *inner*, kehidupan Yanti agak membaik pada tahun keempat. Dia diangkat menjadi staf administrasi dengan gaji Rp 600 ribu per bulan. Cuma gaji tersebut tidak dia terima secara utuh di awal atau akhir bulan, melainkan dicicil pembayarannya setiap dua pekan sekali.

Dengan upah minim itu, Yanti memilih hidup di rumah susun sederhana sewa. Tarifnya hanya Rp 50 ribu per bulan.

NASIB serupa dialami Agus, buruh lain di Kota Makmur, Sukoharjo, Jawa Tengah. Seharian-hari, dia adalah staf pemasaran untuk sebuah pabrik cat di sana. Gajinya Rp 600 ribu per bulan. "Kalau bisa memenuhi target penjualan, biasanya dapat tambahan Rp 400 ribu per bulan," katanya.

Ditambah gaji istrinya, sebulan penghasilan pasangan ini hanya Rp 1,5 juta. Meski minim, mereka memberanikan diri mulai mencicil

sebuah rumah tipe 29 di Perumnas Sukoharjo. Mereka baru punya satu anak.

Anggota Dewan Pengupahan Sukoharjo dari unsur buruh, Joko Sucipto, menerangkan baik Yanti maupun Agus merupakan potret bagaimana kehidupan buruh di kota tersebut.

“Dari sedikitnya 400 perusahaan yang ada di catatan kami, hanya 80% perusahaan yang membayar upah sesuai UMK, sementara lainnya tidak,” katanya geram.

Total jumlah perusahaan wajib lapor di Sukoharjo sebanyak 212 perusahaan. Dari jumlah itu, 24 perusahaan di antaranya tergolong perusahaan besar yang masing-masing mempekerjakan lebih dari 500 orang. Perusahaan sedang ada 51 buah, yang rata-rata mempekerjakan 100-500 buruh. Sisanya adalah perusahaan kecil. Total jumlah buruh di Sukoharjo adalah 50.211 orang.

Ketika dimintai konfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sukoharjo, Sugiyanto, membantah sinyalemen Joko. Menurutnya, semua perusahaan di Kota Makmur sudah membayar gaji buruh sesuai UMK.

“Dari total 200 lebih perusahaan yang tercatat di Disnakertrans, semua sudah membayar upah sesuai UMK. Kalau ada perusahaan yang tidak membayar upah buruh sesuai UMK, itu berarti mereka yang tidak masuk dalam catatan Disnakertrans alias perusahaan yang tidak masuk wajib lapor. Itu biasanya perusahaan kecil dan menengah,” jelas dia.

UPAH Minimum untuk wilayah Kabupaten Sukoharjo, pada 2009 ini ditetapkan senilai Rp 710 ribu. Tahun depan, Bupati mengusulkan kenaikan menjadi Rp 769.000 per bulan. Usulan ini hanya terpaut Rp 500,- dari hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan secara tripartit yakni senilai Rp 769.500.

Meski angka upah minimum sudah mendekati kebutuhan hidup layak, aktivis buruh masih curiga. Mereka menilai angka hasil survei hidup layak versi pemerintah agak janggal. Kepala Bagian Litbang Serikat Pekerja Nasional (SPN), Sigit Hastono, menunjuk nilai komponen perumahan yang ganjil.

"Dari tujuh komponen survei Kebutuhan Hidup Layak yang ditetapkan Pemkab (Pemerintah Kabupaten), coba lihat komponen ketiga yaitu perumahan," ujarnya. Di bagian perumahan, ujar dia, buruh mendapatkan jatah sewa rumah sederhana ukuran 3 x 3 meter dengan harga sewa Rp 40 ribu per bulan. "Itu jelas tidak logis," katanya keras.

"Sekarang mana ada rumah kontrakan yang sewanya Rp 40 ribu per bulan? Apa setiap buruh dengan keluarga kecilnya itu disuruh kos saja?" dia melanjutkan dengan nada tinggi. Untuk sewa kamar kos pun, kata Sigit, jumlah itu tidak cukup. "Sewa kamar kos yang paling jelek di dekat pabrik saja lebih dari Rp 80 ribu per bulan."

Dengan penentuan nilai komponen perumahan serendah itu, kata Sigit, Pemkab Sukoharjo seakan-akan "melarang" buruh untuk punya rumah.

Tidak itu saja. Komponen lain yang dinilai ganjil, kata Sigit, adalah komponen bidang pendidikan. Dalam komponen tersebut, buruh hanya diperbolehkan punya pengeluaran bacaan dan radio senilai Rp 20 ribu per bulan. "Kalau ada orang sinis bilang orang miskin tak boleh sekolah, dengan penghitungan macam ini, pernyataan itu benar adanya," kata Sigit. Dengan jatah Rp 20 ribu per bulan, nyaris tidak mungkin para buruh bisa menyekolahkan anak-anak mereka.

Survei Kebutuhan Hidup Layak yang menjadi acuan penentuan Upah Minimum Kota, menurut Sigit, sejak awal mengandung kesalahan fatal. Survei tersebut dilakukan terhadap buruh yang statusnya lajang, baik itu laki-laki maupun perempuan. "Ini kan sama saja pemerintah melarang buruh menikah, punya anak kemudian menyekolahkan

anak-anak mereka supaya pintar agar tak menjadi buruh lagi,” katanya marah.

Survei Kebutuhan Hidup Layak macam itu, menurut Sigit, amat merugikan buruh. “Ini adalah cara sistemik pemerintah membuat rakyat selalu tidak berdaya dan selalu bermental sebagai buruh,” tandasnya.

Hal senada diungkap peneliti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Akatiga Bandung, Indrasari Tjandraningsih. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Akatiga bekerja sama dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di delapan kabupaten se-Indonesia, model penentuan upah dengan mekanisme Upah Minimum Kota/Kabupaten tidak layak dipertahankan.

“Dari hasil penelitian kami, Kebutuhan Hidup Layak buruh khususnya di Jawa Tengah adalah antara Rp 2 juta untuk yang belum berkeluarga hingga tertinggi Rp 6 juta untuk yang sudah berkeluarga dengan dua anak,” kata Indrasari. Padahal, kenyataannya, rata-rata Upah Minum di provinsi itu hanya Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu per bulan baik untuk lajang maupun yang sudah berkeluarga.

Dampak kesenjangan antara Upah Minimum dan angka kebutuhan riil tersebut, macam-macam. Indrasari menemukan ada buruh yang terpaksa harus mencari utang setiap bulan, mengurangi bahkan tidak mengkonsumsi sama sekali makanan bergizi hingga menikah secara terpaksa hanya sekadar untuk menyiasati agar kebutuhan bulanannya terpenuhi.

KONDISI macam ini membuat kehidupan buruh makin terjepit. Namun, berteriak protes sama saja bunuh diri. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menanti setiap saat.

“Harapan kami sebenarnya tidak muluk-muluk. Seandainya pengusaha belum bisa merealisasikan upah ideal untuk buruh,

setidaknya penuhi 100 persen kebutuhan hidup layak sebagai Upah Minimum. Jangan sampai upah minimum selalu di bawah angka Kebutuhan Hidup Layak,” kata anggota Dewan Pengupahan Sukoharjo, Joko Sucipto. “Kami juga berharap pengawasan pemerintah terhadap pengusaha lebih dioptimalkan,” katanya.

Dulu, ujar Joko, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo pernah mengalokasikan dana untuk pengawasan hingga penyelesaian perselisihan kerja sampai hampir Rp 1 miliar. Namun anggaran itu sekarang menyusut sepertiganya, atau hanya tinggal Rp 300 juta.

Total dana untuk perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan pada anggaran pendapatan dan belanja kabupaten pada 2008 lalu hanya Rp 343 juta. Realisasi dari anggaran tersebut cuma Rp 298 juta. Angka itu bahkan menyusut lagi tahun 2009 ini. Program yang sama pada 2009 ini, tinggal Rp 162 juta.

Memang masih ada pos anggaran untuk kegiatan monitoring dan pelaporan ketenagakerjaan. Namun jumlahnya minim, hanya Rp 43 juta. Itu pun sekitar Rp 14 juta digunakan sebagai honorarium pegawai negeri sipil (PNS).

“Kalau anggaran pengawasan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun semakin kecil, lantas efektivitasnya itu di mana?” kata Joko dengan liris. (*)

Pemenang III kategori cetak “Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009”. Naskah ini pernah dipublikasikan di Solo Pos pada tanggal 12 – 14 Oktober 2009.

NASIB BURUH DI LUAR NEGERI

Hujan Batu Di Negeri Orang

Oleh. Rusdi Mathari, Adiyanto, Nala Dipa, Teguh Nugroho, Agus Triyono, Kristian Ginting dan Rizky Amelia (KORAN JAKARTA)

Diagungkan sebagai pahlawan devisa, nasib jutaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri justru nelangsa. Pemerintah belum serius melindungi mereka.

MUNTIK binti Bani menghembuskan nafasnya yang terakhir, tepat ketika presiden negaranya dilantik di Senayan. Pada 14 Oktober 2009 lalu, sekujur tubuh buruh perempuan asal Jember, Jawa Timur itu penuh luka saat ditemukan polisi Diraja, di rumah majikannya di kawasan Taman Sentosa, Klang Selangor, Malaysia. Tangan dan kakinya terikat, rambutnya digunduli. Dia sendiri pingsan. Hari keenam setelah dirawat, Muntik akhirnya tewas.

Di Jakarta, tepat ketika hidup Muntik yang sengsara berakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat ucapan selamat dari koleganya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib tun Abdul Razak. Dua peristiwa kontras pada hari yang sama ini seakan adalah simbol bagaimana tidak berdayanya nasib buruh Indonesia di negeri orang. Terlebih kematian Muntik yang mengesankan bukanlah kasus pertama tewasnya buruh kita di seberang lautan.

Pada Agustus 2009 lalu, ada Siti Hajar, buruh migran asal Garut, Jawa Barat, yang babak belur dihajar majikannya. Dua bulan

sebelumnya, ada Nurul Widayanti, buruh perempuan asal Ngawi, Jawa Timur, yang ditemukan tewas gantung diri di Kajang, Selangor, Kuala Lumpur, lantaran tak tahan disiksa.

Kisah tentang buruh Indonesia di luar negeri --atau lebih lazim disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI)-- adalah cerita tentang penderitaan demi penderitaan. Bertahun-tahun, masalah pengiriman, penempatan, dan perlindungan terhadap TKI, selalu jadi soal yang pernah benar-benar selesai dibahas. Padahal setiap tahun, devisa dari para TKI terus mengalir, menggerakkan ekonomi di tanah air.

Pada 2006, para TKI menyumbangkan devisa hingga Rp 60 triliun atau naik enam kali lipat dibanding tiga tahun sebelumnya. Jumlah ini berlipat tiga sampai Oktober tahun ini, mencapai Rp 183 triliun. "Meningkatnya luar biasa," ujar Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, sebuah lembaga swadaya yang menangani perlindungan buruh di luar negeri.

Sumbangan TKI terhadap pembangunan daerah juga tak bisa dianggap remeh. Di Jawa Timur, misalnya, sumbangan devisa dari para TKI pada 2001 silam pernah mencapai 1,3 triliun rupiah, atau lebih dari separuh APBD provinsi itu yang 2,464 triliun rupiah. Namun sumbangan devisa yang dibawa pulang para TKI itu, berbanding terbalik dengan perlindungan dan keberpihakan pemerintah. Kalaupun ada perhatian, mengutip Anis Hidayah, seringkali itu hanya sekadar seremonial berbau kepentingan politik.

Menurut catatan Migrant Care, jumlah TKI saat ini berjumlah sekitar 6,9 juta orang. Perinciannya, di Malaysia (3,2 juta orang), Arab Saudi (1,8 juta orang), Hong Kong (130 ribu orang), Singapura (83 ribu orang) dan Taiwan sekitar 24 ribu orang. Tahun ini, akan ada sekitar satu juta orang yang berangkat menjadi buruh di luar negeri.

Satu kasus yang memperlihatkan dengan kasat mata ketidakberpihakan pemerintah terjadi pada Agustus 2002 silam. Ketika itu, ribuan TKI diusir dari Malaysia, menyusul peraturan keimigrasian

baru yang diterapkan negara jiran itu. Pemerintah Indonesia bukan saja tak siap menampung kedatangan mereka di Nunukan, Kalimantan Timur, tapi juga terus membiarkan ribuan TKI itu kembali lagi ke Malaysia tanpa perlindungan dokumen yang memadai. Di sana, mereka menjadi santapan empuk para pemeras dan pasukan pengaman swakarsa, Rela.

Tak hanya di Malaysia, minimnya perlindungan juga terjadi di negara lain. Pada Oktober 2009 lalu, puluhan TKI wanita di Arab Saudi dipulangkan setelah menerima perlakuan kasar dan pelecehan seksual.

TAK hanya siksaan fisik. Ketakjelasan gaji dan pelanggaran kontrak kerja juga jadi menu sehari-hari buruh kita di luar negeri. Bariyah misalnya. Perempuan 18 tahun asal Kebumen, Jawa Tengah ini, hanya sempat setahun mengais ringgit di Malaysia. Di tengah krisis ekonomi akhir 2008 lalu, pabrik elektronik tempatnya bekerja gulung tikar dan mem-PHK ribuan karyawannya, termasuk Bariyah. Pahitnya, gaji dan tunjangan lain yang jadi hak mereka, tak kunjung dibayar.

Di saat terjepit seperti itu, bantuan tak datang dari manapun. Kedutaan Besar RI di Malaysia, kata Bariyah, sama sekali tidak peduli. "Enggak ada sama sekali orang dari KBRI yang datang membantu permasalahan kami. Menengok aja enggak. Selama saya di sana tak sekalipun pernah melihat orang KBRI," tegasnya.

Bariyah adalah korban agen buruh ilegal. Ketika berangkat ke Malaysia, 2007 silam, dia memalsukan data umurnya jadi tiga tahun lebih tua. Meski duduk di kelas III Sekolah Menengah Kejuruan 1 Kebumen, dia berangkat dengan ijazah SMP. "Saya ingin membantu orang tua," katanya saat ditanya alasannya nekat berangkat.

PT Mutiara Karya Mitra, perusahaan pengirim buruh yang

merekruit Bariyah, berkantor pusat di Medan dan memiliki cabang di Yogyakarta. Melalui kantor cabang itulah, Bariyah dan kawan-kawan diberangkatkan ke Malaysia. Ongkosnya terbilang murah, tak sampai satu juta rupiah. Dia hanya perlu mengeluarkan uang 250 ribu rupiah untuk tes kesehatan, serta 500 ribu rupiah untuk membuat paspor. Prosesnya pun kilat. Hanya dua hari di tempat penampungan, tanpa tambahan bekal keterampilan khusus, mereka dikirim ke Malaysia. "Enggak ada itu training-training," kata Bariyah.

Singkat kata, Bariyah dan teman-teman sekampungnya tiba di Malaysia dan ditempatkan di pabrik elektronik di Selangor. Upahnya lumayan sekitar 450 ringgit, ditambah tunjangan makan, tunjangan kesehatan, uang kehadiran, dan lembur. Jika ditotal hampir mendekati tiga juta rupiah. Namun, dari jumlah itu mereka harus mengembalikan sekitar 250 ringgit (750 ribu rupiah) per bulan kepada pihak penyalur. Selama 10 bulan, upah mereka dipotong sebesar jumlah tersebut sebagai ganti "jasa" pihak PJTKI.

Namun, memasuki akhir 2008, produksi perusahaan tempat Bariyah bekerja terus menurun karena merosotnya permintaan akibat resesi global. "Perusahaan lalu menetapkan kebijakan *shift*. Seminggu masuk, seminggu libur. Otomatis gaji kami dipotong," paparnya. Tak lama setelahnya, pabrik mereka tutup.

Malangnya, sampai sekarang, hak uang asuransi PHK Bariyah sebesar Rp 10 juta, tak penuh diterima. Dia hanya bagian Rp 4 juta. Alasan PT Proteksi Jakarta –perusahaan asuransi yang jadi mitra perusahaan pengirim Bariyah—kasus Bariyah adalah PHK massal. "Saya tidak tahu harus melapor kemana," keluh Bariyah. Dia sudah mengadu ke parlemen dan pemerintah daerah, tanpa hasil.

MENJADI TKI adalah harapan sebagian masyarakat akibat sempitnya lapangan kerja dan impitan kemiskinan di kampung mereka. Berbekal pendidikan yang minim, para TKI bermimpi bisa mendulang dolar, ringgit atau real, kendati hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh kasar, sopir, dan pekerjaan kerah biru lainnya.

Karena itulah, posisi tawar mereka kebanyakan lemah. Sejak keberangkatan mereka ke negara-negara tujuan, para calon TKI ini sudah rawan dikibuli oleh para calo dan agen pengirim TKI. Catatan Government Watch, sebuah lembaga independen pemantau kinerja pemerintah, menunjukkan hampir 95 persen TKI yang bekerja di luar negeri berbekal dokumen dan data palsu. Data soal pendidikan, status pernikahan, sampai usia mereka, dipalsukan untuk mengelabui aturan perburuhan di negara tujuannya.

Tak mengherankan, sesampai di “tanah harapan”, mereka banyak ditimpa masalah. Bukan hanya soal upah dipangkas, paspor ditahan, dan mendapat perlakuan kasar sampai pelecehan seksual—tapi dalam soal kecakapan kerja pun, mereka kalah dibanding rekan-rekan mereka yang berasal dari negara “pengekspor” tenaga kerja lain seperti Filipina misalnya. Karena sering bermasalah, banyak dari mereka yang terjerat agen-agen nakal yang dengan lihai memberi iming-iming jalan pintas. Di Kuwait, Uni Emirat Arab, Hongkong dan Singapura, ada laporan yang memperkirakan ribuan TKI wanita kita beralih profesi menjadi pelacur.

Kondisi amburadul ini diperparah oleh tak lengkapnya data pemerintah soal TKI. Badan Pusat Statistik misalnya, beralih minimnya catatan mereka tentang jumlah TKI per tahun, bukan persoalan besar, karena data itu ada di setiap pemerintah daerah. Sikap menganggap kecil persoalan macam ini membuat publik sulit menaruh harapan besar akan ada perubahan mendasar di masa depan.

Apalagi, pemerintah selama ini selalu cuci tangan. Saat disorot, pemerintah beralih sudah memasang persyaratan ketat soal

pengiriman TKI kepada Perusahaan Jasa TKI. Misalnya, sebelum seorang TKI benar-benar dikirim, PJTKI harus sudah terlebih dulu punya perjanjian kerja dengan agen mitranya di negara tujuan TKI. Ini penting untuk kejelasan penempatan kerja para calon TKI. Agen mitra tadi juga harus membuat perintah kerja yang disahkan oleh KBRI setempat.

Berdasarkan perintah kerja itu, izin merekrut TKI diberikan pemerintah kepada PJTKI. Selebihnya ada pemeriksaan kesehatan, pelatihan bahasa negara tujuan, dan keterampilan yang diuji melalui lembaga uji kompetensi Universitas Indonesia. Hanya mereka yang lulus sajalah yang mestinya dikirim menjadi TKI.

Di lapangan, aturan ideal di atas kertas itu kerap dikelabui. Syarat itu dianggap terlalu berbelit dan memakan waktu lama. Akibatnya jalan pintaslah yang lebih sering dipilih. PJTKI macam ini, oleh pemerintah, dicap sebagai agen ilegal. Meski sudah dinilai melanggar aturan, sepak terjang “agen-agen tidak resmi” ini tetap marak di berbagai daerah. Akibat ulah mereka yang sekadar asal kirim TKI, berbagai masalah menunggu buruh kita di seberang. Setiap sebuah kasus muncul dan diberitakan, pemerintah selalu menuding “itu ulah agen ilegal.” Semua saling tuding dan cuci tangan.

Potensi pelanggaran makin terbuka, karena banyak negara Arab menerapkan sistem *visa on arrival*, dimana visa bisa diperoleh setelah buruh tiba di negara tujuan. Para PJTKI nakal memanfaatkan celah ini dengan mengirim TKI tanpa visa. Mereka hanya memasang satu orang di negara tujuan untuk membantu mengurus visa masuk. Hasilnya mudah ditebak, para TKI yang gagal mendapatkan visa, terdampar di negeri orang, tanpa pernah jelas siapa agen pengirimnya.

Anis lalu menuturkan pengalamannya sendiri pertengahan 2009 lalu. Dia baru saja menghadiri sebuah pertemuan di Mumbai, India, saat melihat puluhan perempuan berjilbab, dengan air muka lusuh tampak kebingungan di bandara kota itu. Dari wajahnya, Anis yakin

mereka adalah perempuan-perempuan asal Indonesia.

“Mau ke mana?” tanya Anis memberanikan menyapa para perempuan itu. Salah seorang menjawab, mereka hendak ke Dubai. Mereka tidak tahu kenapa mereka terdampar di Mumbai, dalam perjalanan menuju Dubai. Sudah seharian calon buruh asal Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat ini, menanti pesawat berikutnya ke Dubai, tanpa bekal uang dan makanan.

“Rute perjalanan buruh perempuan kita dari Jakarta-Singapura-Mumbai baru ke Dubai merupakan modus PJTKI untuk mendapatkan biaya perjalanan lebih murah, “ kata Anis menjelaskan. Rute berbelit itu, kata Anis, sengaja digunakan untuk mengelabui petugas.

Dari cerita para perempuan itu, Anis belakangan tahu, mereka diberangkatkan oleh PJTKI Amanitama Berkah Sejati yang beralamat di Jalan Pengantin Ali 32, Jakarta, tanpa melalui prosedur legal. Visa yang digunakan pun ternyata hanya visa kunjungan yang berlaku selama tiga bulan. Para buruh ini tidak sempat memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan mereka, karena paspor dan visa baru diterima di bandara, menjelang keberangkatan.

Kisah semacam itu, hanyalah satu cerita dari banyak kisah pilu para TKI atau TKW yang hendak berangkat ke luar negeri. Sebagian besar mereka, adalah orang awam, yang tidak paham prosedur dan tata cara pemberangkatan, siapa yang akan menampung mereka di tempat tujuan, dan berapa upah yang mereka terima. Atau kalau pun ada yang tahu, informasi yang mereka terima kebanyakan juga terbatas.

Setibanya di negara tujuan pun, gangguan tidak berakhir. Gaji mereka dipotong seenaknya, sementara perlindungan dan pelayanan yang seujung kuku. Bariyah, buruh asal Kebumen, Jawa Tengah, yang bekerja di Malaysia, sudah membayar Rp 750 ribu untuk ongkos berangkat, namun masih dibebani utang ke PJTKI sebesar 5,5 juta rupiah yang harus diangsur selama 10 kali. Dia tak pernah tahu bagaimana ceritanya dia bisa berutang sebesar itu. Dia makin takjub ketika tahu

utangnya membengkak menjadi Rp 7 juta, setibanya di Malaysia.

“Perlu pelayanan satu atap, untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan memicu tumbuhnya calo,” kata Anis Hidayah, menawarkan solusi. Sistem pelayanan terpadu bagi TKI sebenarnya sudah ada di 14 lokasi di seluruh Indonesia. Namun, Anis menilai itu masih belum memadai. Dia minta pemerintah mengucurkan dana untuk membangun program perlindungan TKI yang menyeluruh.”Ini bisa menjadi agenda 100 pemerintahan Yudhoyono,” katanya.

Model perlindungan satu atap macam itu bukannya tak mungkin. Apalagi mengingat para buruh ini sudah merogoh kocek sendiri untuk membayar berbagai pungutan atas nama “proteksi”. Selama ini, setiap buruh yang berangkat bekerja ke negeri orang, dipungut uang perlindungan sebesar US\$ 15 atau sekitar 150 ribu rupiah. Selain itu, mereka juga harus membayar ongkos untuk mengurus rekomendasi surat bebas fiskal sebesar 600 ribu rupiah. Semua pungutan itu dilakukan melalui PJTKI tapi kemudian masuk ke rekening Departemen Keuangan.

“Itu semua masuk ke dalam kas negara. Bayangkan kalau yang berangkat dalam setahun ada satu juta orang, berapa yang masuk ke kas negara?” kata Anis.

Pungutan itu belum termasuk ongkos perlindungan asuransi yang besarnya Rp 400 ribu per orang. Juga ada biaya pembekalan akhir pemberangkatan sebesar Rp 50 ribu per orang dan dana pemulangan Rp 25 ribu. Dua pungutan yang disebut terakhir, sekarang sudah dihapuskan. Tapi hingga sekarang belum pernah ada kejelasan ke mana dan bagaimana uang para TKI itu dibelanjakan.

“Tidak ada yang didapat oleh para TKI dari pungutan-pungutan itu,” kata Anis. Padahal, uang itu mestinya digunakan memberikan pelayanan bantuan hukum bagi TKI yang bermasalah. Misalnya untuk menyewa pengacara di luar negeri bagi buruh kita yang tertimpa

masalah hukum.

“Ironisnya, ketika TKI kena masalah hukum, para pegawai KBRI di negara-negara tujuan selalu beralasan tidak punya anggaran untuk memberi bantuan. Bahkan terkadang para TKI itu tidak didampingi pengacara,” kata Anis.

Saat dimintai konfirmasi soal pungutan itu, staf ahli Menko Perekonomian Bidang Ketenagakerjaan, Arifien Habibie mengaku, sama sekali tidak tahu. Arifien sebaliknya mengatakan, dirinya baru mendengar kalau ada pungutan sebesar US\$ 15 kepada TKI sebelum berangkat ke luar negeri. “Yang saya tahu adalah negara akan memperoleh jaminan, si-TKI bisa mendapatkan pekerjaan,” katanya.

Jawaban yang lebih terang datang dari Roswati, pejabat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Kata dia, uang US\$ 15 yang dipungut dari setiap TKI termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Uang itu digunakan untuk pembinaan dan peningkatan upaya perlindungan tenaga kerja. Di dalamnya sudah termasuk pembekalan akhir pemberangkatan, biaya pembuatan kartu kerja serta perlindungan lainnya. Dana itu juga dipakai untuk mengurus TKI non prosedural untuk dipulangkan ke Indonesia.

Pengenaan biaya itu, kata Roswati, diatur oleh PP No. 92 Tahun 2000 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di departemennya. Tapi kenapa TKI yang menanggung biaya itu? “Kami masih mengupayakan akses ke perbankan agar perlindungan buruh dibiayai oleh lembaga itu dan tidak ditanggung lagi oleh PJTKI,” ujarnya.

MASALAH TKI di luar negeri, menurut Anis, justru dimulai dan diakhiri di Indonesia. “Mereka ke luar dari mulut singa masuk ke mulut buaya,”

kata Anis. Pemerintah bukannya tidak sadar itu. Arifien Habibie, staf ahli Menko Perekonomian Bidang Ketenagakerjaan, membenarkan pernyataan Anis. Kata dia, 90 persen persoalan TKI termasuk soal pungutan yang bejibun itu, diawali dari negeri sendiri.

Arifien bercerita, dalam sebuah lawatan ke Kuwait pada Oktober 2009 lalu, dia melihat langsung ada 600 TKI yang kabur dari majikan mereka hanya dalam waktu dua bulan, gara-gara sudah tidak sanggup bekerja. Mereka lalu ditampung di lokasi pemberhentian KBRI Kuwait. “Ini membuktikan ada kongkalikong oknum Depnaker dengan PJTKI untuk menjual TKI tanpa pembekalan,” kata Arifien.

Seorang pejabat di Depnaker mengakui, memang banyak masalah dalam proses perekrutan dan pengiriman TKI. Banyak pihak yang bermain dalam proses tersebut sehingga mengakibatkan tarik menarik kepentingan. Para pihak yang memiliki kepentingan itu, bertujuan hanya sekadar mencari keuntungan dari proses perekrutan dan pengiriman TKI.

“Ada koordinasi yang buruk antara pelaksana, pejabat, dan pembuat regulator. Ini juga bisa dipicu sikap dan kinerja staf di level bawah,” katanya, seraya mengakui beroperasinya banyak calo di Depnaker.

Jika tak kunjung ada penjelasan, Anis mengibaratkan pungutan US\$ 15 dari setiap TKI sebagai dana siluman. “Departemen Keuangan tidak pernah terbuka untuk apa uang para TKI itu,” kata Anis. Maka makin naaslah nasib buruh kita di luar negeri. Sudah diperas kanan kiri, tak jelas pula siapa pelindung mereka jika musibah tiba. Nasib mereka bagai sudah jatuh tertimpa tangga. (*)

Berkaca pada Filipina

PADA Desember 2002 silam, kesabaran Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo seperti telah diujung batas. Dia menginstruksikan Patricia Santa Thomas, Menteri Tenaga Kerjanya untuk terbang ke Hong Kong. Misinya memprotes kebijakan pemerintah Hong Kong yang berencana memotong gaji pekerja asing termasuk dari Filipina. Di negeri itu, pekerja asal Filipina paling sedikit ditaksir ada 1,5 juta orang.

Sebelumnya, pemerintah Hong Kong memang berencana merealisasikan pemotongan upah tenaga kerja asing yang bekerja di sana sebesar 400-500 dolar Hong Kong pada akhir tahun 2002. Kebijakan itu dianggap tidak realistis bagi tenaga kerja asing yang rata-rata bekerja di sektor informal yang hanya sebesar 1.500 - 3.670 dolar Hong Kong per bulan.

Lobi diplomatik juga dilakukan Arroyo melalui Patricia ke Indonesia. Intinya, mengajak pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim pekerja terbanyak ke Hong Kong untuk memprotes kebijakan sepihak itu. Akhirnya, permintaan Filipina itu memang tidak dikabulkan sepenuhnya oleh pemerintah Hong Kong. Nominal pemotongan hanya dikorting sekitar 40 persen. Namun setidaknya, aksi itu telah menjadi preseden positif terhadap kebijakan sepihak negara penerima buruh migran Filipina.

Tiga bulan sebelum peristiwa itu, Arroyo sudah diuji persoalan yang sama. Kali ini Malaysia yang menyinggung harga diri Filipina: 80 ribu tenaga kerja Filipina terancam dideportasi pemerintah Malaysia. Arroyo berang lalu angkat bicara kepada rakyat Filipina melalui siaran televisi nasional. Dia menyerukan agar rakyat Filipina memberi dukungan moril kepada saudara mereka yang bekerja di Malaysia.

Efeknya cepat. Kantor Duta Besar Malaysia di Filipina, Mohammad Taufik, dibombardir protes. Arroyo juga menelepon langsung Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Mahathir Mohamad. Malaysia pun melunak. Keinginan Arroyo dipenuhi pemerintahan Mahathir.

Dua kisah ini belum seberapa. Arroyo juga pernah mengancam memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab dan Singapura ketika dua buruh migrannya --Sarah Balabagan dan Flor Contemplacion-- terancam hukuman mati. Nama Arroyo pun harum sebagai ikon pelindung dan pembela tenaga kerja Filipina di luar negeri.

Filipina memang dianggap sebagai negara pengeksport buruh migran yang peduli terhadap nasib pekerjanya. "Sedangkan Indonesia seperti tidak pernah mau belajar dari Filipina. Mengurus buruh migrannya seperti mengurus barang," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah.

Meski sama-sama negara pengirim buruh migran asal Asia Tenggara, kiprah Indonesia dalam perlindungan buruhnya di luar negeri, memang kalah jauh. Padahal soal volume buruh migran, Filipina hanya unggul sedikit dibanding Indonesia. Filipina menempatkan 7,5 juta pekerjanya di 140 negara, sementara Indonesia punya 6 juta pekerja di 20 negara.

Filipina tampaknya tahu betul bagaimana menghargai pekerja migrannya. Kontribusi ekonomi para buruh Filipina ini yang mencapai seperenam dari pendapatan domestik Filipina atau sekitar US\$ 8 miliar per tahun, tampaknya berbanding lurus dengan kepedulian pemerintahnya.

Filipina melindungi buruh migrannya dengan payung hukum yang kuat yakni Omnibus Rules and Regulations Implementing The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 atau yang biasa disebut Republic Act No. 8042. Sebagai undang-undang, kebijakan

ini lahir dari proses legislasi yang partisipatif dan lewat konsultasi dan perdebatan yang adil di parlemen. Kebijakan nasional ini juga didukung itikad pemerintah Filipina yang sudah meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families pada Juli 1995.

Situasinya memang berbeda di tanah air. Di Indonesia, kebijakan teknis tertinggi untuk perlindungan TKI hanya berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hingga saat ini, Indonesia juga belum meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families tersebut. "Padahal konvensi itu menjadi dasar moral kesetaraan hak dan perlindungan pekerja migran di seluruh dunia," ungkap Direktur Institute for Migrant Workers (iWork) Liason Unit Jakarta, Yuni Asriyanti.

Sejak 1982, Filipina telah mempunyai Philippine Employment Overseas Agency (PEOA). Lembaga yang diketuai Menteri Tenaga Kerja itu gencar berkampanye untuk berhati-hati terhadap keculasan perusahaan jasa tenaga kerja (PJKT) melalui program "Anti Illegal Recruitment Campaign".

Setiap tiga bulan, PEOA melansir up date sertifikasi PJTK yang memenuhi persyaratan. Termasuk PJTK yang masuk dalam daftar hitam karena telah melakukan pelanggaran atau penipuan terhadap buruh migrannya.

Sedangkan soal pungutan, memang, calon buruh migran Filipina juga dikenakan kewajiban membayar fee sebesar 100 dolar AS per orang. Namun, kelak mereka gagal berangkat dengan alasan apa pun, uang itu dapat kembali sepenuhnya.

Namun yang pasti, seluruh biaya yang dikeluarkan calon buruh migran dibuat secara transparan dan dapat diketahui di setiap kantor PJTK. Sedangkan PJTK hanya bisa mendapatkan uang jasa dari setiap buruh migrannya dengan jumlah yang tidak melebihi

satu bulan upah. Itu pun pada umumnya dapat dibayar secara mencicil sampai si pekerja kembali ke Filipina.

Lalu di Bandara Manila, setiap kelompok buruh migran yang pulang disambut oleh para perwakilan pemerintah yang menanti mereka di gerbang kedatangan di jalur khusus itu. Tanpa membedakan buruh migran itu di kelompok pekerja formal atau informal. Buruh pabrik atau seorang eksekutif di perusahaan ternama. Kalau sudah begini, tampaknya kita memang harus belajar banyak dari Filipina. (*)

Nominasi kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah ini pernah dipublikasikan di Koran Jakarta pada 8 November 2009

NASIB BURUH DI BANTEN

Yang Terjepit Jatah Preman dan Jawara

Oleh. Wisnu Nugroho dan Ahmad Arif (KOMPAS)

Buruh di Banten kerap tak kebagian Tunjangan Hari Raya. Masa depan serikat buruh di sana pun meredup oleh praktek outsourcing.

SURAT itu tiba menjelang Lebaran. Isinya padat, singkat dan jelas: *"Dalam rangka menunjang kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan Balaraja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1430 H tahun 2009 M, kami mengajukan permohonan bantuan serta partisipasinya untuk memberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri kepada anggota kami dengan jumlah personel terlampir."*

Kop suratnya resmi lengkap dengan tanda tangan sekretaris camat dan cap kecamatan setempat. Penerimaanya salah satu pabrik di Serang, Banten, tertanggal 27 Agustus 2009 lalu.

Nyaris bersamaan, sebuah surat lain tiba. Isinya senada. Kali ini pengirimnya Komandan Komando Rayon Militer (Koramil). Sama dengan surat Camat, surat Koramil juga disertai cap dan ditandatangani Komandan Koramil. Kutipan surat itu berbunyi: *"Dengan dasar rencana kerja komandan Koramil..., bidang pembinaan teritorial dan kesejahteraan moril anggota dan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal*

1430 H, mohon kiranya Bapak berkenan memberikan dukungan THR untuk anggota."

Bagi pihak perusahaan, surat itu bukan permintaan biasa. "Itu surat perintah wajib bayar," kata Rano, bukan nama sebenarnya. Rano adalah karyawan bidang sumber daya manusia di perusahaan ekspor-impor peralatan rumah tangga di Serang.

Pihak perusahaan memang tak mungkin menolak surat seperti itu. Uang yang kemudian harus disetor setidaknya Rp 250 ribu untuk setiap anggota. Kalau anggota yang dilampirkan enam personel, berarti Rp 1,5 juta yang wajib disetorkan.

Surat permintaan lain datang dari kepolisian, kantor kecamatan, kantor kelurahan, ketua rukun warga, hingga rukun tetangga. "Belum lagi yang menelepon langsung ke kantor," kata Rano, yang sudah lebih dari tiga tahun harus melayani permintaan "upeti" dari berbagai pihak itu.

Selain hari raya dan tahun baru, permintaan serupa biasanya dikirimkan menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. "Di luar itu, setiap bulan kami juga harus setor ke mereka walaupun jumlahnya tak sebesar hari-hari besar itu. Biasanya Rp 150 ribu-Rp 250 ribu per institusi," kata Rano.

Akibat upeti semacam itu, kerap kali kepentingan buruh harus dipinggirkan. Rano, yang bertubuh kurus, mengaku setoran kepada aparat setempat harus selalu dibayarkan meskipun kondisi keuangan perusahaan sedang seret. Apa boleh buat, biaya buruh yang biasanya dikorbankan.

"Bisa dibilang, perusahaan lebih wajib membayar tunjangan hari raya (THR) ke aparat dan preman daripada ke buruhnya sendiri," ungkapnya.

Untuk menghindarkan kewajiban perusahaan membayar THR, buruh yang diterima dengan sistem kontrak diputus masa kontraknya sebelum Lebaran. "Setelah Lebaran, perusahaan dengan mudah akan

membuka lowongan lagi. Begitu berulang,” ujar Bagus Musharyo, Koordinator Sekretariat Perburuhan Institut Sosial (SPIS) Jakarta.

Sistem telah membuat buruh tak berdaya dan lemah sehingga mudah disingkirkan.

PELEMAHAN posisi tawar buruh di Banten tak hanya terkait jatah preman macam itu. Riwayat peminggiran buruh sudah dimulai sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya tentang perjanjian kerja waktu tertentu (Pasal 56 Ayat 2) dan tentang perusahaan pemborong dan penyedia jasa kerja (*outsourcing*). Sejak undang-undang itu diberlakukan, perekrutan buruh kontrak dan *outsourcing* di Banten, lebih banyak dilakukan pihak ketiga dengan perlindungan atau relasi erat dengan para jawara.

Pelemahan itu kemudian melahirkan dan menyuburkan kembali praktik-praktik percaloan. Di lapangan, praktik itu lebih mirip perdagangan orang ketimbang sistem distribusi tenaga kerja yang memberikan keadilan. Di Serang, yang merupakan salah satu kantong industri di Indonesia, potret keterpurukan dan ketidakberdayaan buruh itu nyata.

Di Serang juga, UU No 13/2003 bertemu dengan “pihak ketiga” yang telah ratusan tahun menjadi parasit ekonomi rakyat di daerah ini. Pihak ketiga itu tampil sebagai agen penyalur buruh. Mereka bisa aparat desa, kelompok jawara, aparat militer, polisi, hingga serikat buruh, yang mengambil keuntungan sendiri.

Hampir setiap karyawan baru yang mau masuk perusahaan di wilayah Serang dan Tangerang harus membayar jasa pada pihak ketiga ini. Calon buruh harus membeli formulir pendaftaran kerja Rp 25 ribu-Rp 60 ribu per berkas kepada mereka. Variasi harga tergantung dari posisi yang ingin dituju.

Setelah diterima bekerja, mereka juga harus membayar uang jasa Rp 1 juta-Rp 3 juta, tergantung lamanya kontrak kerja yang didapat. Sistem pembayarannya ada yang di muka atau dicicil per bulan setelah kerja didapatkan. Ketika kemudian buruh itu mendapat kontrak baru, dia harus membayar lagi. Dengan sistem ini, hampir separuh pendapatan buruh selama bekerja disetor ke pihak ketiga.

Buruh telah menjadi "sapi perahan" bagi "aktivitas parasit" yang kerap berkedok perusahaan *outsourcing* ini. "Semakin banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) diartikan sebagai peluang akan adanya perekrutan tenaga baru. Perekrutan itu berarti keuntungan bagi perusahaan *outsourcing* dan para 'parasit' itu," kata Bagus.

Munculnya lembaga *outsourcing*, menurut penelitian SPIS, juga mengakibatkan implikasi yang sangat jauh. Pertama, terkikisnya energi kolektif dan keterwakilan yang selama ini diakui sebagai bagian dari komponen tawar dalam pasar kerja. Kedua, pergeseran pola hubungan industrial ke arah individualisme.

"Serikat pekerja diberangus dan dilemahkan. Bahkan, beberapa serikat pekerja menjadi agen penyalur buruh kontrak, sudah seperti perusahaan *outsourcing*. Sebuah ironi, tetapi ini terjadi," ungkap Bagus.

Karena pelemahan ini, penyelesaian kasus sengketa buruh dengan perusahaan sering berlarut-larut. Kasus yang menimpa Kahar, Koordinator Forum Solidaritas Buruh Serang (FSBS), disebut Bagus sebagai contoh. Hampir dua tahun kasus hukumnya tak selesai. Untuk menopang hidup keluarga, selama proses hukum itu, Kahar menggantungkan hidup keluarga dengan bekerja pada perusahaan lain secara kontrak melalui perusahaan *outsourcing*. Sebuah ironi lain.

"Sejak lima tahun terakhir, hampir tak ada lagi perekrutan buruh tetap. Semuanya buruh kontrak," kata Isbandi Anggoro dari Serikat Pekerja Metal Indonesia wilayah Serang.

Terhadap hal itu, buruh tidak berdaya. Usaha buruh berserikat

dan mewariskan serikatnya pun terancam punah karena tidak adanya kepastian pekerjaan lewat sistem *outsourcing* yang sudah dikuasai pihak ketiga dengan relasi erat dengan jawara.

PERJUMPAAN dengan para buruh di Serang dan Tangerang mengingatkan pada sistem ekonomi pengisapan yang dipraktikkan pemerintah kolonial. Waktu itu jawara, yang merupakan wajah Banten purba, menjadi penghubung di antara dua kutub, kuli dan majikan.

"Pada awalnya, jawara memiliki posisi mulia sebagai pembela rakyat kecil menghadapi kekuasaan kolonial. Mereka dahulu biasa disebut sebagai tentaranya para kiai," ujar Lili Romli, peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Lili menyebutkan, sejak pemerintah kolonial datang, jawara terbelah. Ada yang setia dengan asal-usul sosial (*social origin*)-nya, tetapi banyak yang dimanfaatkan untuk alat kekuasaan karena kepentingan pragmatis para jawara. "Transformasi jawara menjadi alat kekuasaan sempurna pada era Orde Baru," ujar Lili.

Setelah 10 tahun reformasi, transformasi jawara makin masif. Selain menjadi alat kekuasaan, jawara mencengkeram dan berelasi erat juga ke semua lingkup kuasa. Sebut saja misalnya pengusaha, aparat pemerintah pusat hingga desa, pengadilan, tentara, polisi, partai politik, pengadilan, dan lembaga formal lainnya. Apa yang dialami para buruh dan juga pengusaha adalah contohnya.

Menurut Lili, jawara tidak hanya menjadi penghubung antara kuli dan majikan seperti wajah Banten purba. Kini, jawara juga telah masuk ke partai politik dan mendapat posisi utama karena kultur Banten memang menaruh hormat pada mereka. "Tidak hanya untuk buruh, jawara kini juga menjadi broker untuk birokrat," ujar Lili.

Di mata Lili, posisi jawara Banten memang tidak berubah

meskipun buruh dan pengusaha jengah menghadapi mereka. Gurita kuasa jawara membuat penolakan atas kehadirannya terasa sia-sia. Lili mengharapkan ada intervensi pihak luar, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk menghadirkan masyarakat madani (civil society) dan demokratisasi di Banten.

Namun, upaya itu tidak mudah. Para jawara yang telah mengooptasi hampir semua lini di Banten punya relasi kuat juga dengan penguasa pusat. Relasi itu nyata ketika kekuasaan pusat hendak dipertahankan penguasanya dalam pemilu.

"Karena itu, harus ada terobosan dari kelas menengah. Bersamaan dengan itu, perlu hadir kepemimpinan alternatif yang melibatkan jawara pada tempat mulianya sebagai pembela rakyat kecil, bukan pengisapnya," ujar Lili.

Banten tentu menanti, setelah ratusan tahun relasi kekuasaan yang mengisap rakyat kebanyakan itu tidak berganti. (*)

Nominasi kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah sudah pernah dipublikasikan di Harian Kompas pada tanggal 7 Oktober 2009.



Every Little Helps

Oleh. Wendra Ajistyatama

Para perempuan sedang membersihkan kerang hijau yang diperoleh dari Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara. Mereka mendapatkan dua ribu rupiah untuk setiap kg kerang hijau yang telah dibersihkan.

Nominasi kategori foto "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Foto sudah pernah dipublikasikan di The Jakarta Post tanggal 11 Mei 2009.



BURUH PABRIK ROKOK

Nasib Sang Pelinting

Oleh. Aditya Wardhana (VHR MEDIA.COM)

Buruh rokok selalu dijadikan tameng industri untuk menghalau peraturan pengendalian tembakau. Padahal, hak mereka nyaris tak dipenuhi.

ADZAN subuh baru saja berlalu. Ana, 28 tahun, merampungkan solat. Air wudhu masih membekas di wajahnya. Bergegas dia bersiap memulai hari.

Demi menghemat ongkos angkutan, dua ribu perak, ibu beranak satu ini memilih berjalan kaki menyibak kabut di jalan Desa Pandanwangi, Tumpang, Malang, Jawa Timur. Sesampai di tepi jalan raya, barulah dia mencegat mobil angkutan menuju lokasi Perusahaan Rokok (PR) Pakis Mas, di Arjosari, tempat Ana berjibaku selama lima tahun terakhir sebagai buruh pelinting rokok.

Kehidupan Ana, dan ratusan ribu buruh perusahaan rokok lainnya, telah menjadi penyokong paling kokoh bagi raksasa industri rokok. Dengan upah tak seberapa, mereka bekerja habis-habisan tanpa prospek karir. Tahun demi tahun mereka habiskan di belakang meja dan mesin pelinting rokok.

Pagi itu, pukul 5.20. Ana sampai di depan Pabrik Pakis Mas. Gerbang besi hijau itu tertutup rapat. Masih ada sepuluh menit sebelum

keriuhan pagi dimulai. Ana membuka rantang. Nasi putih, tahu bumbu kecap. Ana menyantap bekal sarapannya dalam sunyi.

Satu demi satu teman Ana berdatangan. Tegur sapa mengalir. "Piye, Yu, sehat?" Basa-basi ala kadarnya.

Tepat pukul 5.30. Gerbang besi dibuka. *Sreek...* Tanpa menunggu komando, dua ratusan buruh berdesakan masuk melintas gerbang. Ana tak mau ketinggalan. Sarapan yang tak seberapa bergizi dia sudahi. Rantang butut dimasukkannya ke dalam tas.

Berada di barisan paling depan, bagi Ana dan kawan-kawan, adalah soal penting. Inilah lapis pertama *survival of the fittest* ala pabrik rokok. "Antre, Mas, biar dapat jatah bahan baku banyak," kata Ana. Siapa yang berada paling dekat dengan meja mandor, dialah yang berpeluang mendapat jatah bahan baku lintingan rokok lebih banyak.

Dan, jangan main-main dengan sang mandor. Jika pengawas merasa kurang sreg dengan si buruh, jatah akan dipangkas atau bahkan ditiadakan. "Kalau mandornya nggak suka *ama* seseorang, bisa saja orang itu nggak dikasih jatah biar pun dia sudah antre di depan," kata Ana. Cek-cok antara buruh dan mandor pastilah ada. Tapi, "Posisi mandor, kan, lebih kuat. Jadi, kita ngalah aja," kata perempuan asli Malang ini.

Di Pakis Mas, setiap buruh diberi jatah melinting 2.500 batang rokok sehari. Untuk setiap seribu batang, upahnya Rp 9.000. Jadi, saban minggu Ana mengantongi upah Rp 135 ribu atau Rp 540 ribu per bulan. Angka ini jauh di bawah upah minimum regional Kabupaten Malang yang Rp 802 ribu.

Upah itu pun diraih dengan catatan. Ana mesti bekerja saban hari, tak boleh absen gara-gara sakit dan apalagi membolos. Ruchan, pemilik Pakis Mas, menjelaskan bahwa sistem pembayaran upah buruh linting dan verpak adalah borongan. "*Gak kerjo yo gak bayaran,*" Ruchan menegaskan. Tak kerja, ya tak ada upah. Sederhana.

Nah, dengan prinsip demikian, wajarlah jika para buruh berebut

jatah bahan baku. Jika beruntung, datang paling pagi dan bisa merebut hati sang mandor, maka si buruh bisa mendapat jatah bahan baku 3.000 batang rokok. Ini berarti ada lima ratus linting rokok lebih banyak dari jatah normal.

ANTREAN di meja mandor berkurang. Satu per satu buruh beranjak ke meja kerja masing-masing. Ana menenteng nampan seng berisi tembakau, *ambri* (kertas khusus untuk rokok), dan lem –siap untuk dijadikan 3.000 batang rokok. Ana bernyanyi dalam hati, bersyukur atas rezeki hari ini.

Sebuah mesin pelinting rokok terbuat dari kayu jati duduk kokoh di atas meja kayu. Khidmat Ana duduk di belakang meja. Tangan trampilnya segera beraksi. Selembar kertas diletakkan di mesin linting dengan tangan kiri. Pada waktu bersamaan, tangan kanan menjumput tembakau yang kemudian ditaruh di kertas *ambri*. *Sreet...*, tembakau dirapikan. Lantas, *ceklek*, tuas mesin ditarik dengan tangan kanan. *Hap*, tak sampai sepuluh detik, sebatang rokok meluncur ke bawah mesin.

Hari itu, detik demi detik berlalu. Semua buruh tenggelam dalam pekerjaan. Tak ada obrolan, tak ada yang mondar-mandir, bahkan untuk sekadar beringsut ke toilet. “Biar bisa kejar target, Mas,” kata Ana.

Rokok hasil lintingan diikat per 20 batang untuk memudahkan penghitungan. Tak selesai di sini. Selesai melinting, Ana masih harus menggunting untuk merapikan tembakau di kedua ujung rokok. Baru setelah itu rokok siap diserahkan kepada sang mandor.

Dulu, pekerjaan melinting rokok dikerjakan dua orang buruh, yang satu bertugas melinting yang satunya bertugas menggunting. Upah pun dibagi, dua per tiga untuk si pelinting dan untuk buruh gunting.

“Karir” Ana pun berawal dari ajakan seorang bibi untuk menjadi

buruh gunting. Di sela pekerjaan itulah si bibi mengajari Ana melinting rokok. “Belajar *gak suwe*, tidak lama, Mas. Paling sehari udah lancar,” kata Ana.

Tujuh tahun Ana bekerja sebagai buruh gunting. Lalu, pabrik tempat Ana dan bibinya bekerja ditutup lantaran bangkrut maka Ana berpindah tempat kerja, ya di Pakis Mas itu. Ana langsung menjadi buruh linting.

Beberapa tahun terakhir, menurut Ana, tak banyak pabrik yang tetap menggunakan jasa buruh gunting. Pekerjaan melinting dan menggunting digarap oleh seorang buruh saja, demi efisiensi.

Siang menjelang. Seribu batang rokok siap diserahkan Ana kepada mandor. Ada 20 batang rokok dia lebihkan. “Jaga-jaga kalau ada yang disortir,” kata Ana. Sortiran itu, antara lain, lantaran guntingan tidak rapi, mencong, atau meleset dari ukuran standar.

Usai menghadap mandor, Ana langsung melanjutkan pekerjaan. Tangannya kembali pada ritual yang sama. Ribuan batang rokok menantinya.

Tidak ada jam istirahat tetap bagi buruh. Target utama mereka adalah tuntas melinting bahan baku. Soal ngaso, tinggal atur waktunya, terserah mana suka. “Saya biasanya *laut* (istirahat - Red) jam 1, lalu kerja lagi,” Ana menerangkan. Hanya 30 menit. Itulah waktu bagi Ana untuk makan siang ala kadarnya, ke kamar kecil, dan solat. Setelah itu, tak banyak cing-cong, Ana kembali berkhidmat di depan mesin linting.

Pukul 4 sore, seluruh pekerjaan usai. Jatah lintingan hari itu telah tuntas. Ini berarti Ana dan kawan-kawannya bekerja sebelas jam dalam sehari. Tiga jam lebih panjang ketimbang jam kerja buruh yang wajar. Namun, tak ada upah lembur di sini. “Hitungannya khan berdasar jumlah produksi bukan panjang jam kerja,” kata Ruchan.

Berhubung gaji dihitung hanya berdasar jam kerja, maka persoalan pun jadi runyam jika pabrik rokok libur produksi. PR Delapan Wijaya,

misalnya, sudah empat bulan berhenti sementara. Sialnya, upah buruh juga mandeg.

Tutik dan 200-an buruh PR Delapan Wijaya pun kelabakan. Selama pabrik libur beroperasi, mereka menerima separuh upah. “Upah ini juga karena perjuangan serikat pekerja. Dulu, sebelum ada serikat, malah gak dibayar sama sekali,” kata Tutik yang telah lebih dari 10 tahun bekerja di Delapan Wijaya.

Tutik pun *moncok* ke pabrik rokok lain. *Moncok* adalah sistem kerja borongan lepas yang telah dikenal sejak jaman kolonial. Buruh *poncokan* hanya bekerja secara temporer dan dibayar berdasar hasil kerja. Pabrik rokok diuntungkan dengan sistem ini karena tidak perlu mengangkat pekerja tetap. Nanti, entah kapan, bila di Delapan Wijaya tak lagi libur, Tutik akan berhenti moncok dan kembali bekerja tetap di Delapan Wijaya.

Sejauh ini belum ada informasi kapan Delapan Wijaya berhenti dari libur panjang. Tutik, perempuan setengah abad ini, hanya mengangkat bahu ketika ditanya bagaimana nasibnya ke depan. “Denger-denger pabriknya mau dijual. Saya, *sih*, cuman bisa sabar aja,” kata Tutik. “Kalo memang diPHK, ya saya minta pesangon dipenuhi dengan baik.”

ROKOK adalah komoditi yang lezat dan gurih. Inilah industri yang mampu mengusung para pemiliknya menghiasi daftar orang paling kaya sedunia. Majalah Forbes Asia, tahun 2007, misalnya, mencantumkan dua nama juragan rokok di negeri ini dalam daftar orang kaya sejagat. Keluarga Rahman Halim, pemilik Gudang Garam, ada di urutan 538 dengan aset US\$ 1,9 miliar. Lalu, keluarga Budi Hartono, pemilik Djarum, ada di urutan 664 dengan aset US\$ 1,5 miliar.

Kekayaan yang kinlong itu jauh dari kondisi yang dialami buruh pabrik rokok. Ana dan jutaan buruh lainnya hanya sekrup kecil bagi

kemakmuran yang dinikmati para juragan.

Persoalan makin rumit di kalangan perusahaan rokok skala kecil. Status kerja buruh di level ini menyimpan banyak masalah. Geng Wahyudi, Ketua Paguyuban Pengusaha Rokok Kecil (Paperoki), menekankan status buruh di pabrik kecil. "Mereka bekerja dengan sistem borongan lepas," kata Geng. Artinya, buruh hanya diupah berdasar hasil kerja. Tak ada ikatan lebih.

M Rully, pejabat dari Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Malang, sepakat dengan Geng. "Kalo mau mengerjakan ya silakan, kalo ndak mau ya terserah" ujarnya. Jadi bila berhenti bekerja, buruh tidak mendapat pesangon dari perusahaan.

Pola hubungan kerja semacam ini cenderung menempatkan buruh pada posisi yang lemah. Andy Irfan, Sekretaris Jenderal Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia wilayah Jawa Timur, mengkritik keras pola hubungan kerja ini. "Pengusaha buta terhadap undang-undang ketenagakerjaan," katanya.

Sistem kerja borongan, menurut Andy, hanyalah sistem penghitungan pengupahan. Sedangkan status kerja sesuai Undang-undang Nomor 13, tahun 2003, ada tiga macam, yakni pekerja tetap, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) alias pekerja kontrak, dan pekerja harian lepas. Nah, "Buruh rokok termasuk hubungan kerja tetap," kata Andy, "Mereka mengerjakan inti produksi. Pekerjaannya bersifat terus menerus dan jangka panjang."

Berhubung status kerja tidak jelas, kata Andy, pengusaha pun mudah berkelit dari tanggungjawab. Hak normatif seperti hak cuti, tunjangan hari raya, dan jaminan sosial tenaga kerja rentan dilanggar.

Sebagian besar buruh, 90 persen perempuan, nyaris tak pernah menikmati cuti haid dan cuti melahirkan dengan layak. Karyawati yang tidak masuk lantaran melahirkan, misalnya, otomatis tidak diberi gaji dan tunjangan. Cuti haid pun tak berbeda. "Kalau pun ada cuti

haid, mengurusnya sangat susah sehingga buruh memilih untuk tidak cuti,” kata Bambang Edy, Ketua Divisi Advokasi Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kabupaten Malang.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) pun tak ada. Ruchan, pemilik PR Pakis Jaya, umpamanya, mengaku belum menyertakan buruhnya dalam program Jamsostek. “Dihitung dulu apa masih bisa *nutut (terjangkau - Red)*,” kata Ruchlan.

Demi memperjuangkan hak, para buruh pabrik Pakis Mas menghimpun diri dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Pakis Mas. Mereka mempertanyakan status kerja dan hubungan dengan perusahaan. “Kata juragan, sih sudah karyawan tetap, tapi saya gak tau keabsahannya, apa udah dicatatkan ke Disnaker” kata Ana. Saat ini SPBI Pakis Mas sedang bernegosiasi mengenai keikutsertaan Jamsostek.

Geng Wahyudi mengakui, 70 persen dari 194 perusahaan rokok kecil di Malang mengupah buruhnya di bawah UMR. Kisaran gaji buruh ini antara Rp 7000 – 10.000 per seribu batang rokok. Permintaan pasar yang tidak bisa dipastikan, ketatnya persaingan dengan pabrik besar, menurut Geng, menyebabkan perusahaan rokok tak bisa member gaji yang layak.

Namun, Bambang dan Andy menilai ketidakpatuhan ini bukan saja lantaran pengusaha yang bandel. Pemerintah pun dinilai tidak serius mengawasi. “Dinas Tenaga Kerja gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan,” kata Andy.

Kepala Seksi Norma K3 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang tidak membantah tuduhan Andy. “Kami kekurangan tenaga,” kata Rully mengakui.

Persoalan tidak berhenti pada kurangnya pengawas. Dinas Tenaga Kerja, menurut Rully, banyak menerima tekanan setiap saat hendak membenahi mekanisme perburuhan di sektor industri rokok. Akibatnya, banyak perkara tak bisa diputuskan dan dibiarkan begitu

saja. “Kalau sudah menyangkut kasus buruh rokok, kita tutup buku, deh,” kata Rully mengakui.

Undang-undang, peraturan, tidak lagi menjadi acuan. “Yang penting, bagaimana pabrik bisa operasi dan buruh bisa kerja,” katanya.

Kuatnya posisi industri rokok memang tak terbantahkan. Lobi dan tekanan seperti yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, seperti pengakuan Rully, bukanlah hal baru. Maklum, kontribusi industri ini bagi pendapatan daerah tidak kecil.

Bagi pemerintah daerah Malang, industri rokok adalah primadona perekonomian. Selama tiga dekade, perusahaan rokok telah menyerap tenaga kerja terbesar di Malang, selain tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. “Peran industri rokok cukup penting,” kata Djaka Ritamtama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang.

Tahun 2007-2008, tercatat ada 58.632 buruh rokok di Malang yang tersebar pada 375 perusahaan rokok skala kecil, sedang, dan besar.

Secara keseluruhan, pabrik rokok di Malang menyumbang 54 persen penerimaan PPh (pajak penghasilan) di Kantor Wilayah Jatim III –meliputi Trenggalek, eks Karesidenan Besuki, Malang, dan Kediri. Pada tahun 2008, sampai bulan Agustus, setoran PPh dari pabrik rokok mencapai Rp 8,33 miliar dari target yang mencapai Rp 1,8 triliun.

Tentu saja, besarnya kontribusi terhadap pendapat daerah tidak lantas membuat pabrik rokok diistimewakan di mata undang-undang. Tahun demi tahun, kalangan industri menggunakan buruh sebagai tameng menangkal aturan (lihat boks: Pengendalian Tembakau dan Buruh). Tapi, seperti dikemukakan Andy, “Kenyataannya, hak buruh selama ini diabaikan.”

Tubagus Haryo Karbyanto, aktivis Jaringan Pengendalian Tembakau Indonesia, menilai industri hanya bersiasat dengan menggunakan alasan buruh. “Itu propaganda kosong,” kata Tubagus.

Industri rokok, menurutnya, kini justru gencar melakukan mekanisasi proses produksi.

Tenaga buruh akan terus ditekan serendah mungkin, digantikan mesin-mesin mati, semata demi mempertebal keuntungan pemilik pabrik. Jadi, kata Tubagus, “Siapa sebenarnya yang sedang kita bela?”

Pengendalian Tembakau dan Buruh

SAMPAI detik ini, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Ini sebuah kesepakatan internasional tentang pengendalian tembakau yang sudah disetujui 192 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada 2003. Sampai kini konvensi ini telah diratifikasi oleh 137 negara.

Tujuan konvensi ini adalah melindungi masyarakat dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan, dan konsekuensi ekonomi akibat konsumsi tembakau serta paparan terhadap asap tembakau.

Bagi kalangan industri, FCTC adalah ancaman bagi kelangsungan pengusaha menikmati gurihnya keuntungan rokok. Buruh sering dijadikan tameng ketika desakan ratifikasi konvensi ini mencuat. Pengusaha kerap beralih pengangguran akan meledak bila cukai naik dan aturan diperketat.

Keluhan antara lain datang dari Kelu Harianto Swara Mardani, Direktur Utama PT Karya Niaga Utama, pabrik rokok di Malang. “Terus terang, jika harga jual eceran dinaikkan hal itu tidak bisa diikuti dengan harga jual pabrik,” katanya. Jika ini terjadi, Harianto melanjutkan, pabrik terpaksa mengurangi jam kerja karyawan. “Dari pada mengurangi jumlah karyawan yang jelas lebih menyakitkan,” kata Harianto.

Beberapa pekan lalu, beragam reaksi muncul ketika wacana

perlunya fatwa haram rokok mengemuka. Pengamat, kalangan serikat buruh, sampai sesama ulama menentang fatwa haram dengan berbagai dalil.

Bisnis.com melansir pendapat Piet Abdullah, Direktur Pelatihan dan Pendidikan Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SPRTMM) Kudus. "Jika MUI benar mengeluarkan fatwa itu, kami yang pertama menolak," kata Piet. "Pasalnya rokok tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan, namun juga penyediaan lapangan kerja dan pendapatan." Bahkan, Abdurrahman Wahid, mantan presiden, juga menyatakan fatwa haram dapat membuat pengangguran bertambah.

Begitulah, buruh kerap kali menjadi mantra sakti yang diucapkan demi menghalau segala jenis aturan pengendalian tembakau. Ketakutan matinya industri rokok, ratusan ribu buruh terkena cambuk PHK, kesempatan kerja menghilang, dan terpuruknya petani tembakau dinyanyikan berulang-ulang.

Adakah sederet mantra itu benar atau sekadar mitos tanpa dasar?

Abdillah Ahsan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia membedah batas mitos dan fakta ini. Tahun 2004 jumlah tenaga kerja di sektor industri rokok skala besar dan menengah adalah 259 ribu. Jumlah ini adalah 1,16 persen dari seluruh tenaga kerja industri dan hanya 0,3 persen dari seluruh tenaga kerja. Industri rokok berada pada peringkat ke 48 dari 66 industri penyerap lapangan kerja. "Artinya," kata Abdillah, "Kontribusi industri rokok terhadap lapangan kerja nasional tidak terlalu signifikan."

Abdillah juga menyoroti bahwa, pada 2000-2006, upah bulanan pekerja industri rokok tergolong di bawah rerata industri makanan dan industri lain. Buruh industri rokok menerima Rp 452 ribu saban bulan, sementara buruh industri makanan menerima rata-rata Rp 547 ribu per bulan, dan buruh industri secara umum

digaji Rp 728 ribu setiap bulan.

Jika industri begitu seret membayar upah buruh, tidak demikian halnya dengan ongkos promosi. Industri rokok begitu royal dan *jor-joran* untuk pos yang satu ini. PT Bentoel International Investama, misalnya, sesuai laporan keuangan tahun 2007, mengeluarkan Rp 256,265 miliar sebagai biaya promosi. Ini berarti lebih dari dua kali lipat biaya tenaga kerja yang dikeluarkan PT Bentoel pada tahun yang sama, yakni Rp 105,804 miliar.

Menggunakan buruh sebagai dalih menangkal aturan juga dikritik Tubagus Haryo Karbyanto dari Indonesian Tobacco Control Network. "Itu propaganda kosong," kata Tubagus. Industri rokok kini justru gencar melakukan mekanisasi proses produksi. Tenaga buruh ditekan serendah mungkin. Jadi, katanya, "Siapa sebenarnya yang sedang kita bela?"

Pada tahun 2006, jumlah sigaret kretek mesin mencapai 132 miliar batang, sigaret putih mesin 16 miliar batang. Ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah produksi sigaret kretek tangan yang 95 miliar batang. Walhasil, proses mekanisasi memang keniscayaan.

Tubagus juga menyoroti kelihaian industri rokok memproduksi mitos dengan label *Mild, Light, low tar low nicotine* yang dikesankan lebih sehat. "Padahal, itu bohong. Justru akibatnya, orang dipacu merokok lebih banyak," kata Tubagus. Konsumsi rokok lebih banyak dan jenis *mild, low tar low nicotine*, ini pasti dibuat dengan mesin. Bukan jenis rokok lintingan tangan buruh.

Pengendalian tembakau, Abdillah dan Tubagus yakin, tidak akan berdampak seperti yang digembar-gemborkan industri. Publikasi Bank Dunia berjudul "*Curbing the Epidemic: Government and the Economic of Tobacco Control*" menyebutkan, riset membuktikan bahwa banyak negara tidak mengalami lonjakan pengangguran dari pembatasan konsumsi rokok. Sebaliknya, mereka memperoleh keuntungan dengan naiknya kadar kesehatan dan produktivitas

warga.

Pengendalian rokok, Abdillah menekankan, tidak akan banyak menurunkan konsumsi. "Soalnya, ini barang adiktif yang menagih para pecandunya untuk terus ngebul," katanya. Kenaikan cukai rokok sebesar 10 persen, misalnya, hanya akan memangkas tingkat konsumsi rokok 3,5 – 6 persen.

Kenaikan cukai juga berdampak positif pada pembukaan lapangan kerja. Begitu konsumsi rokok turun, maka pengeluaran rumah tangga akan dialihkan pada kebutuhan lain semisal membeli daging, susu, atau pendidikan. Walhasil, akan terjadi pertumbuhan positif sektor yang lain.

Simulasi dalam riset Abdillah membuktikan bahwa kenaikan cukai 10 persen justru membuka peluang tenaga kerja untuk 281.135 orang di sektor lain. Memang, Abdillah melanjutkan, dari 66 sektor industri, enam sektor yang terkait dengan rokok mengalami penurunan 168.000 lapangan kerja. Namun, 60 sektor industri lain akan mengalami kenaikan lapangan kerja untuk 449.144 orang.

Abdillah menegaskan, dampak pengurangan tenaga kerja pun sifatnya jangka panjang. "Mungkin baru terasa setelah 10 tahun mendatang," katanya. Jadi, sebenarnya tersedia cukup banyak waktu bagi pemerintah untuk menyiapkan rencana penanggulangan dampak ini, termasuk menyiapkan dukungan modal dan pendampingan teknis. "Misalnya, pabrik rokok skala kecil diarahkan untuk berganti jenis usaha lain yang lebih sehat," kata Abdillah.

Lagipula, Abdillah menambahkan, selama ini industri rokok hanya terkonsentrasi di dua propinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu pun tidak tersebar di semua wilayah. Di Jawa Timur, industri rokok terpusat di Kediri dan Malang. "Jadi," kata Abdillah, "Penanggulangan dampak tenaga kerja seharusnya tidak terlalu pelik." Syaratnya hanya satu: komitmen pemerintah.

Nominasi kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah ini pernah dipublikasikan di www.VHRmedia.com pada tanggal 28 November 2008.



PERJUANGAN BURUH SEKTOR DOMESTIK

Mengangkat Derajat

Pramuwisma

Oleh. R. Fitriana (BISNIS INDONESIA)

DARTI, ibu beranak satu dari Wonogiri, memilih meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) alias pramuwisma di sebuah keluarga muda yang kaya dengan gaji Rp 700 ribu per bulan. Pasalnya, dia tidak dapat mengambil libur hari Minggu untuk berkumpul dengan anak dan suaminya yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di kawasan Slipi, Jakarta Barat, apalagi sang majikan membedakan makanan untuk dirinya dan milik tuan rumah.

Tidak hanya itu, Darti tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali belanja ke pasar atau pergi bersama majikan sambil menjaga anak sang bos, bahkan kerja sehari-hari pun sering lebih dari 8 jam yang tidak sesuai standar orang bekerja dalam 1 hari.

Wanita berusia 25 tahun itu lebih menerima pekerjaan yang sama di sebuah rumah keluarga muda dengan gaji hanya Rp 400 ribu per bulan ditambah beras sekitar 5 kilogram setiap bulannya.

“Kerja di tempat yang sekarang, meski gaji lebih rendah, saya bisa bertemu anak dan suami setiap hari, karena pekerjaan saya hanya

dari pagi sampai malam menjelang untuk menjaga anak majikan dan membersihkan rumah,” katanya kepada saya, belum lama ini.

Bagi sebagian PRT di Indonesia, gaji besar memang menggiurkan, apalagi jika masih lajang. Tapi apabila sudah berumah tangga dan tidak dapat membawa anak ke tempat kerja, dipastikan memilih menerima gaji secukupnya, tetapi masih ada waktu untuk bercengkerama dengan keluarga.

Sebenarnya pemberian waktu bekerja yang benar dan ada hari beristirahat menjadi satu dari sekian banyak praktik terbaik bagi para PRT, seperti yang menjadi standar International Labour Organization (ILO).

Praktik terbaik lainnya adalah adanya upah minimum bagi PRT, adanya kontrak kerja dan perjanjian kolektif, serta hak cuti dan pemberian jaminan sosial terhadap para pekerja di rumah tangga.

Memang banyak peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur masalah pekerjaan wanita dan pria sebagai PRT di luar negeri, tapi sekitar 2,59 juta orang di Tanah Air yang menjadi PRT masih berada di luar sistem perundangan formal.

Sebagai gantinya, hubungan kerja antara para PRT dan majikan atau pengguna jasa mereka pada umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan.

Bagi sebagian besar PRT, kepercayaan sudah cukup, apalagi jika mereka diperlakukan sebagai anggota keluarga, mendapat pengalaman baru dan menarik, serta dapat kembali pulang suatu saat dengan pendapatan yang tidak mereka peroleh pada kesempatan lain.

SAMPAI kini memang tidak ada undang-undang khusus di Indonesia tentang PRT. Apalagi ada sikap budaya yang menunjukkan masyarakat Indonesia enggan membuat peraturan formal tentang PRT.

Laporan ILO tentang peraturan PRT di Indonesia menyebutkan sebagian masyarakat pada kenyataannya jarang sekali menyebut mereka sebagai pekerja (*worker*), melainkan hanya sebagai pembantu (*helper*).

Praktik menyebut PRT sebagai pembantu juga memperkuat indikasi ada keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara PRT dan majikannya. Terlebih banyak pramuwisma berasal dari keluarga jauh atau desa seasal dengan majikan.

Sebagai gantinya, para majikan sebagai pengguna jasa memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, di mana mereka melindungi, memberi makan, tempat tinggal dan uang saku, serta gaji sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan.

Aspek paternalistik dari hubungan kerja ini yang dipadukan dengan fakta bahwa kebanyakan tugas dilaksanakan di dalam rumah dan tidak dianggap produktif secara ekonomi, berarti budaya Indonesia secara umum memandang hubungan PRT dan majikan bersifat pribadi.

Karena sifatnya yang informal, kekeluargaan dan paternalistik antara PRT dan majikan, maka penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajiban pun biasanya dilakukan secara informal.

Ini artinya, PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme seperti pengadilan industri yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pekerja di sektor formal.

Bahkan, sistem UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjangkau para PRT. Sejumlah undang-undang nasional lainnya memberikan perlindungan di bidang-bidang tertentu, meski dengan masih secara terpisah dan terbatas. Misalnya, UU No. 23/ 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Minimnya peraturan ini membuat posisi tawar PRT jadi lemah.

Pada saat yang sama, kondisi kerja mereka pun masih jauh dari ideal. ILO misalnya menemukan bahwa ada sekitar 2,6 juta anak di Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tak hanya itu, ketiadaan kontrak kerja membuat PRT kerap bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa upah yang memadai. Sebagian bahkan tak digaji sama sekali. Semua ini mendorong ILO untuk mengangkat isu kelayakan kerja dan kesejahteraan PRT menjadi isu utama konferensinya pada 2010 ini.

Padahal, jika saja ada kemauan politik, pemerintah bisa mengambil peran sentral dalam perlindungan buruh sektor domestik ini. Tanpa harus menunggu desakan ILO, pemerintah seharusnya bisa memulai pembentukan gugus tugas antardepartemen dengan jalinan komunikasi bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan masyarakat.

Gugus tugas ini dapat mendukung masyarakat dengan melakukan konsultasi publik dan secara sungguh-sungguh mengambil masukan teknis tentang rancangan undang-undang, peraturan daerah, dan bentuk-bentuk peraturan lain.

Cara lain untuk bekerja sama dengan masyarakat adalah dengan pembentukan sistem mediator konflik majikan dengan PRT yang terakreditasi, menyusun rencana tindakan nasional tentang hukum internasional di Indonesia untuk membahas kewajiban hukum dan memperluas komitmen melalui sejumlah ratifikasi.

Sudah jelas, Indonesia membutuhkan undang-undang yang spesifik tentang perlindungan bagi PRT di dalam negeri, bukan hanya undang-undang bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai PRT di luar negeri.

Yang menjadi permasalahan, dari mana upaya tersebut harus dimulai dan kapan pelaksanaannya? Tinggal waktu yang menjawab.

(*)

Nominasi kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah ini pernah dipublikasikan di Bisnis Indonesia pada tanggal 28 Mei 2009



PENIPUAN BURUH

Janji Kosong ke Korea

Oleh. Sudrajat, Anton Septian, Eko Ari Wibowo, Joniansyah, Sorta Tobing dan Dianing Sari (KORAN TEMPO)

Sekitar 600 calon tenaga kerja merasa ditipu karena tak jadi diberangkatkan ke Korea Selatan. Belasan miliar rupiah sudah mereka gelontorkan ke kantong para broker. Polisi kini turun tangan. Sejumlah organisasi dan tokoh penting di pemerintah dan parlemen dituding terlibat.

TAWARAN menggiurkan itu masih diingat betul oleh Gunawan Johan, Ketua Paguyuban Persatuan Tenaga Kerja Wijaya Kusuma Cilacap, Jawa Tengah. Seorang tamu penting, 6 Februari 2008, datang menyampaikan kabar gembira.

"Ada proyek untuk para kader," ujar sang tamu berapi-api seperti ditirukan Gunawan ketika ditemui di Markas Besar Kepolisian RI, Senin dua pekan lalu.

Tamu itu, Tri Suwasto, Wakil Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Gotong Royong alias Kosgoro, organisasi sayap Partai Golkar.

Kepada segenap anggota Paguyuban, Tri juga memperkenalkan diri sebagai wakil PT Kosindo Pradipta--unit bisnis Kosgoro di bidang penempatan tenaga kerja Indonesia--wilayah Jawa Tengah.

Ia memang mengantongi dua surat tugas untuk merekrut para calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Korea. Satu surat dari Direktur Utama Kosindo Zeid Arifin tertanggal 5 Februari 2008. Lainnya dari

Ketua Umum Kosgoro H. Effendi Jusuf pada 19 Februari 2008.

Tri, kata Gunawan, di forum itu menawarkan kepada mereka yang memiliki keahlian khusus untuk bekerja di sejumlah perusahaan di Korea Selatan. Salah satunya di perusahaan otomotif Daewoo. "Gratis," ujar Tri saat itu.

Gaji yang ditawarkan sebagai tukang las, cat, pipa, kayu, dan tukang mengaduk semen pun aduhai: berkisar Rp 7-10 juta per bulan. Siapa tak tergiur?

Tak mau sembrono, Gunawan selepas pertemuan itu bertandang ke Gedung Mas Isman, Kantor Pusat Kosgoro, di Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta Pusat. Di sana ia antara lain berkenalan dengan para petinggi Kosgoro.

Gunawan juga diperlihatkan foto-foto Tri bersama direksi Kosindo, anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Ardy Muhammad, dan pengusaha Korea.

Semua itu membuatnya yakin betul terhadap reputasi Kosindo. Anggota Paguyuban pun berbondong-bondong mendaftarkan diri agar bisa bekerja di Negeri Ginseng.

Saat pendaftaran dibuka, sekitar 2.000 calon langsung mendaftar. "Tapi yang akhirnya membayar hanya 106 orang," ujar Gunawan, yang pernah bekerja di Trakindo, Jakarta, selama tujuh tahun sejak 2001.

JANJI manis Tri dalam perjalanannya mulai terasa kesat. Ia mematok biaya administrasi Rp 10 juta per orang. Meski begitu, 106 warga dan anggota Paguyuban tetap kepincut dan bersedia membayar meski dicicil. "Total yang saya setor ke dia Rp 800 juta," kata Gunawan.

Diperlihatkannya setumpuk bukti transfer ke Tri melalui Bank BNI dan Mandiri cabang Cijantung. Jumlahnya Rp 5-35 juta sejak akhir Februari hingga Mei 2008. Di luar biaya administrasi, masih

bermunculan rupa-rupa biaya lain senilai total sekitar Rp 60 juta.

Telanjur basah, sekitar 20 calon tenaga kerja bahkan nekat mengajukan kredit ke Bank Perkreditan Rakyat BKK Cilacap. Sertifikat tanah, rumah, kendaraan, dan aset lain sebagai jaminannya. Lewat cara itu, mereka memberi kuasa kepada bank tersebut untuk membayarkan biaya keberangkatan ke Korea kepada Kosindo.

Menurut Direktur Utama BPR BKK Slamet Edi Astar, atas kuasa para calon TKI itu, pihaknya langsung mengirimkan uang ke rekening Direktur Utama Kosindo Zeid Arifin. "Totalnya sekitar Rp 1,4 miliar," ujarnya.

Uang antara lain ditransfer ke rekening BNI milik Zeid pada 3 Juli 2008 (Rp 545 juta), 8 Juli (Rp 495 juta), dan 28 Mei (Rp 139 juta). Di Kosgoro, Zeid tercatat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Jika ditotal, berarti sudah Rp 2,2 miliar uang yang digelontorkan oleh para calon TKI itu. Tapi, kenyataannya, hingga hari ini tak seorang pun anggota Paguyuban yang berangkat ke Korea.

Itu sebabnya, Gunawan bersama empat anggota Paguyuban lain pada 23 Maret lalu melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Mereka mewakili 106 orang--dari total 604 calon TKI--yang menyatakan diri sebagai korban penipuan Kosindo. "Kami tidak jadi dikirim, padahal sudah bayar," ujar Gunawan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jumat pekan lalu.

Upaya ini pun mereka tempuh karena Tri dan Zeid seolah raib. Berkali-kali didatangi ke kantor maupun kediamannya, keduanya tak pernah bisa ditemui Gunawan dan kawan-kawan. "Pernah saya datang ke rumahnya sejak subuh hingga sore," kata Gunawan, "tapi Pak Zeid tak pernah tampak."

Tri Suwasto, yang dihubungi *Tempo*, Kamis dua pekan lalu, mengaku telah menerima setoran uang dari para calon TKI. Tapi semuanya langsung diserahkan ke Kosindo. "Saya ini juga korban,"

katanya. "Penipunya, ya, Pak Zeid."

Sejak kasus ini mencuat, Tri mengaku komunikasinya dengan Zeid terputus. Telepon selulernya, kata Tri, tak pernah aktif. Didatangi ke rumah dan kantor Kosindo pun Zeid tak pernah ada. "Saya siap bersaksi di polisi," ujarnya tak mau disalahkan.

Zeid memang sulit ditemui. Berkali-kali reporter koran ini mendatangi rumah sekaligus kantor Kosindo di kawasan Perdatam, Kalibata, ia tak pernah tampak.

Ketua Umum Kosgoro H. Effendi Jusuf, yang menugasi Tri untuk merekrut para calon TKI, pun lepas tangan. Ia mengaku tak tahu-menahu bahwa masalah rekrutmen calon TKI itu bermasalah. "Nanti akan saya minta laporan dari Pak Zeid kenapa bisa seperti itu," ujarnya.

Baru Kamis siang pekan lalu, Zeid akhirnya menghubungi *Tempo* melalui telepon. Pria keturunan Arab bermarga Alatas itu berkeras menolak disebut penipu.

Kalaupun para calon TKI yang telah menyetorkan uang tak kunjung berangkat, kata Zeid, itu karena perusahaan-perusahaan Korea membatalkan kontrak sepihak. "Mereka kesulitan akibat krisis keuangan global," ujarnya.

Faktor lainnya, dari seratusan orang yang telah menyetorkan uang, cuma 20 orang yang telah memiliki visa untuk bisa bekerja di Korea. "Selebihnya mengundurkan diri," ujarnya.

Pendek kata, Zeid berkeras apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur. Namun, ia berjanji akan mengembalikan biaya yang telah disetorkan para calon TKI.

BAGI Haris Aritonang, kuasa hukum Gunawan dan kawan-kawan, ada satu orang lagi yang perlu dimintai pertanggungjawaban. Telunjuknya

kini mengarah pada M. Jumhur Hidayat.

Selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur pada 2 Juli 2008 telah merestui upaya Kosindo mengekspor calon TKI ke Korea Selatan. "Kami mendukung kegiatan penyeleksian yang akan dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli dari Korea," tulis Jumhur dalam surat persetujuannya.

Restunya inilah yang kini dipersoalkan. Sebab, sejak dua tahun lalu, penempatan tenaga kerja ke Korea Selatan ternyata harus didasarkan pada persetujuan antarpemerintah kedua negara alias *G to G*. Biayanya sekitar Rp 5,5 juta per orang, mencakup biaya pelatihan, visa, hingga tiket pergi-pulang Jakarta-Seoul.

Dengan program *G to G*, otomatis tertutup peluang bagi swasta untuk mengirimkan calon TKI ke Korea. Karena itu, "Jumhur seharusnya menegur Kosindo karena menyalahi aturan," ujarnya, "bukan malah memberikan dukungan."

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Departemen Tenaga Kerja Abdul Malik Harahap mendukung argumen itu. Menurut dia, sebelum ada nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Korea, penempatan TKI ke Korea memang dilaksanakan melalui sistem pelatihan (*industrial trainee system*).

Pemerintah Korea dalam hal ini menunjuk langsung perusahaan swasta dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di negerinya.

Persoalannya, sistem ini ditengarai meningkatkan jumlah tenaga kerja ilegal. Untuk membendungnya, "Pemerintah Korea kemudian mengeluarkan kebijakan penempatan tenaga kerja berdasarkan perjanjian antarnegara," ujar Abdul Malik.

Apa kata Jumhur? Dia pun bergeming tak ada yang salah dengan kebijakannya. Peraturan *G to G*, kata dia, hanya berlaku buat TKI semi-terlatih. Mereka syaratnya minimal lulusan sekolah menengah pertama, bisa berbahasa Korea, dan bisa berangkat ke sana.

Nah, kalau pihak Korea butuh tenaga terlatih atawa *high skill*, seperti suster atau perawat dan *welder* atau tukang las, "Itu tidak termasuk dalam aturan itu," tuturnya. Apa pun kata Jumhur, yang jelas ratusan calon TKI hingga kini tak bisa menguras keringat di Korea. Dua instansi berselisih, TKI apes di tengah-tengah.

TAK hanya Paguyuban Persatuan Tenaga Kerja Wijaya Kusuma Cilacap, Jawa Tengah yang jadi korban kisruh pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea. Nasib apes serupa menimpa Mochamad Archan dan beberapa rekannya yang mewakili 498 calon tenaga kerja Indonesia (TKI). Mereka semula dijanjikan berangkat ke Korea lewat PT Mitra Munara Kencana Lestari, perusahaan yang merekrut para calon tenaga kerja Indonesia. Modus penipuannya serupa dengan kasus yang menimpa buruh dari Cilacap. Belasan miliar rupiah telah mereka gelontorkan sebagai "biaya keberangkatan". Realisasinya nihil.

Kehabisan kesabaran, pada awal 2008 lalu, ratusan calon tenaga kerja Indonesia ke Korea ini mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Total jumlah mereka sebanyak 604 orang.

Polisi bergerak sigap. Tak berapa lama, kasus ini pun kemudian bergulir ke meja hijau. Pada Agustus 2008, Abdullah Ali, Komisaris PT Mitra Munara Kencana Lestari dinyatakan bersalah dan dipenjara 2 tahun 4 bulan. Yang menarik, pada salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang memvonis perkara ini, terungkap pula jejak seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kasus tipu-tipu ini.

Namanya: Ardy Muhammad, anggota DPR dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. Sang Wakil Ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi ini mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Foto Ardy di Gedung Kosgoro yang ditunjukkan Tri Suwasto, Wakil Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Gotong

Royong (Kosgoro) kepada Paguyuban Persatuan Tenaga Kerja Wijaya Kusuma Cilacap, juga berhasil meyakinkan korban untuk menyeter miliaran rupiah.

KETERLIBATAN Ardy pertama kali diungkap Abdullah Ali. Komisaris PT Mitra ini rupanya tak mau disalahkan sendirian. Menurut Ali, perusahaannya gagal memberangkatkan ratusan calon tenaga kerja itu akibat ulah Ardy yang ingkar janji. "Saya sudah menyerahkan uang Rp 1,1 miliar kepada Pak Ardy melalui stafnya, Fahmi, sebanyak 16 kali," kata Ali.

Yang aneh, Ardy ini bak sakti mandraguna. Ia sama sekali tak tersentuh jerat hukum, sementara Ali dan kawan-kawan sudah divonis. Hakim menilai PT Mitra Munara bertanggung jawab penuh atas kasus dugaan penipuan pengiriman tenaga kerja ke Korea ini.

Mentok di jalur hukum, Ali mencoba jalur politik. Bersama ratusan calon buruh yang jadi korban, mereka mengadukan Ardy ke Badan Kehormatan DPR. Ketua Badan Kehormatan Irsyad Sudiro menyatakan bakal segera memanggil Ardy begitu masa reses anggota Dewan berakhir, pertengahan April 2009. "Kami akan meminta klarifikasi atas semua pengaduan itu kepada yang bersangkutan," katanya kepada *Tempo*.

Dokumen pengadilan yang diperoleh *Tempo* mengungkap sebagian peran Ardy dalam kongkalikong pengiriman buruh ini. Di sana disebutkan bahwa peran Ardy dimulai dari Yayasan Persada Nusantara Jaya yang dia bentuk bersama staf ahlinya, Fahmi, pada 14 Agustus 2007. Dalam struktur organisasi, Ardy dan Fahmi masing-masing menjabat pembina dan ketua.

Masih menurut dokumen pengadilan itu, Ardy ternyata telah menjalin hubungan dengan Imron Haji Tavadjio, Direktur Utama PT

Mitra Maju Mulyo Lestari. Perusahaan yang telah bertahun-tahun merekrut calon tenaga kerja untuk diberangkatkan ke berbagai negara inilah yang kabarnya semula "dimintai tolong" oleh Ardy untuk menyiapkan calon tenaga kerja Indonesia ke Korea.

"Dalam sebuah pertemuan di gedung DPR, Pak Ardy Muhammad meminta dicarikan calon TKI ke Korea, karena dia bisa membantu memberangkatkan TKI ke Korea," kata Imron dalam berita acara pemeriksaan polisi.

Dalam perjalanannya, Imron ternyata terjerat utang kepada Abdullah Ali. Untuk menyelesaikan urusan utang-piutang itulah, ia kemudian mengalihkan proyek "pesanan" Ardy tersebut kepada PT Mitra Munara Kencana Lestari, yang dibentuk bersama oleh Imron dan Ali. Di perusahaan ini, Imron dan Ali duduk sebagai komisaris. Sedangkan posisi direktur utama dipercayakan kepada Ade Rully Agustina, putri Ali.

Meski belum memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan tidak menerima penunjukan dari pemerintah untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan, PT Mitra Munara berhasil menjaring 498 calon tenaga kerja, termasuk limpahan dari PT Mitra Maju. Biaya yang dikenakan kepada para calon tenaga kerja sebesar Rp 35-60 juta.

Archan, misalnya, mengaku harus menyetor Rp 52 juta agar bisa bekerja di Korea. "Saya dijanjikan bakal mendapat gaji Rp 20 juta per bulan untuk menjadi operator di pabrik," ujar sarjana ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, ini.

Kenyataannya, angan-angannya baru sebatas mimpi. Ia kini malah harus bekerja serabutan untuk mencari nafkah. Padahal, sebelumnya, Archan sudah bekerja di sebuah lembaga pembiayaan kredit di Malang dengan gaji cukup memadai.

Besarnya ongkos untuk bekerja di Korea antara lain digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan kemampuan berbahasa

Korea. Nah, dalam soal ini, PT Mitra Munara menjalin kerja sama dengan Yayasan Persada milik Ardy. Kerja sama juga mencakup upaya yayasan menjembatani pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke Korea.

Keterlibatan Yayasan Persada diakui Fahmi di persidangan. "Saya sudah mengadakan kerja sama dengan pengusaha Korea," ujar staf Ardy itu. Lewat kerja sama tersebut, pengusaha Korea yang diketahui bernama Jo Yoen Sup akan mencari peluang kerja bagi para calon tenaga kerja di sana. Untuk keperluan itu, Fahmi mengaku telah menyerahkan duit Rp 500 juta yang diterimanya dari PT Mitra Munara kepada Yoen Sup.

Masalahnya, ya, itu tadi, para calon tenaga kerja Indonesia tak kunjung bisa berangkat ke Korea karena ternyata pengiriman tenaga kerja ke sana harus dalam skema kerja sama antarpemerintah alias *G to G*, bukan melibatkan pihak swasta.

Untuk mencari jalan keluar, Imron dan Ade Rully kemudian meminta bantuan Ferry Joko Juliantono, yang dikenal punya hubungan dekat dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat.

Dengan ditemani Ferry, pada Mei 2007, Ade Rully kemudian menemui Ardy di Senayan, untuk mencari solusi pengiriman TKI ke Korea ini. "Saya datang bersama Pak Imron, Ali Ronjikin, Doddy Matondang (sekretaris pribadi Jumhur Hidayat), dan Ferry Joko Juliantono. Kami membawa berkas para calon TKI dan satu tas berisi uang," kata Ade Rully dalam berita acara pemeriksaan. Ardy menolak menerima langsung uang yang diserahkan Imron, sehingga tas berisi uang diserahkan kepada Fahmi.

"Saya tak tahu persis jumlah uang dalam tas karena telah disiapkan sebelumnya. Tapi, dalam sebuah percakapan sebelumnya, Ardy pernah meminta uang Rp 1 miliar," kata Ade Rully.

Kepada polisi yang memeriksanya pada 11 Februari 2008, Ferry

mengaku telah menerima uang Rp 250 juta dari Imron dan Ade Rully. Sekitar Rp 50 juta ia gunakan untuk pergi ke Korea guna mengetahui mekanisme pemasaran tenaga kerja Indonesia ke Korea. "Tapi hasilnya tetap harus *G to G*," kata Ferry. Ia lantas mengembalikan sisa uang Rp 200 juta yang diterimanya.

Ferry juga tak menampik jika dikatakan pertemanannya dengan Jumhurlah yang membuat dirinya dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. "Ya, mungkin karena saya dekat dengan Sdr. Jumhur," katanya dalam berita acara pemeriksaan polisi.

Di situ dia juga mengaku bahwa perkenalannya dengan Imron bermula pada April 2007 dalam acara kunjungan BNP2TKI ke Korea. "Saya waktu itu diajak oleh Sdr. Jumhur," kata Ferry. Meski begitu, Ferry menegaskan tidak pernah memberi janji apa pun kepada Imron. "Lagi pula saya sudah mengembalikan semua uang itu," ujarnya. Selebihnya, Ferry mengaku sudah lupa perihal kasus tersebut.

Ardy juga menepis semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia menampik ketika disebut telah menekan surat tertanggal 27 Februari 2007 yang meminta para calon tenaga kerja Indonesia berangkat ke Jakarta untuk mempersiapkan keberangkatan ke Korea.

Saat ditemui di kantor PNI Marhaenisme di Jalan Gudang Peluru, Tebet, Jakarta, ia balik menuding Abdullah Ali telah memalsukan tanda tangannya. Ia pun mengaku tak pernah memiliki kop surat saat dirinya duduk di Komisi IX DPR, yang membidangi urusan ketenagakerjaan. "Semua itu palsu dan dipalsukan. Begitu selesai mereka dipenjara, akan saya adukan ke polisi," katanya mengancam.

Soal tuduhan menerima uang, lelaki kelahiran Ujung Pandang, 13 Oktober 1949 ini pun tak gentar. Ia meminta si penuduh menunjukkan kuitansi, tanda terima, atau bukti transfer. "Demi Allah, demi Tuhan,

biar tak selamat kalau saya ambil uang dari TKI," ujarnya. "Semua itu fitnah!"

Fitnah atau bukan, uang calon buruh sudah melayang.

MASIH ada satu cerita lagi soal janji-janji kosong broker tenaga kerja ke Korea. Kali ini melibatkan orang-orang dekat Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Badan inilah yang pertamakali membuka jalan bagi penempatan tenaga kerja Indonesia ke negeri ginseng, yang kini jadi masalah panjang.

Kisahanya dimulai pada Januari 2009 lalu. Saat itu, selarik pesan pendek mampir ke telepon seluler Syafrida Isnaini Daulay. Isinya antara lain meminta agar Direktur Utama PT Victory Asia Perkasa itu mengirim sejumlah uang ke rekening atas nama Muhammad Pasha Nasution di BNI cabang Kramat.

Si pengirim pesan, Syawal Nasution, tak lain adalah ayah Pasha. Sehari-hari ia bekerja sebagai anggota staf protokoler Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) M. Jumhur Hidayat.

Syafrida baru dapat memenuhi permintaan itu tiga hari kemudian. Dari total Rp 13 juta yang ditransfer, Rp 10 juta dikirimkan sekitar pukul 08.00. Sedangkan sisanya, Rp 3 juta, menyusul lima menit kemudian.

Transfer dilakukan dari anjungan tunai mandiri Buaran, Klender, Jakarta Timur. Selain mengeruk ATM, Syafrida mengaku telah merogoh duit tunai dari koceknya sebesar Rp 703 juta selama September 2007 hingga pertengahan Januari 2008.

Uang sebanyak itu ia berikan antara lain kepada Buche Rahman, Husnu, dan Syawal. Dua nama pertama masing-masing menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Subdirektorat Pemulangan TKI Luar Negeri BNP2TKI.

"Kami serahkan kepada Pak Syawal yang diketahui oleh Pak Jumhur, Pak Dodi, dan Pak Hendra S.," kata Syafrida dalam pernyataan tertulisnya di atas meterai tertanggal 30 Januari 2009. Dodi dan Hendra masing-masing adalah sekretaris pribadi dan anggota staf profesional Jumhur.

Semua uang itu disetor Syafrida dalam upaya mendapatkan tambahan kuota angkutan di terminal khusus TKI Selapajang di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dari delapan menjadi 20 buah kendaraan. Sejak 20 Juli 2007, PT Victory menjadi satu dari belasan perusahaan jasa angkutan pemulangan TKI dari Selapajang ke berbagai daerah.

Syafrida mengaku telah mengajukan permohonan penambahan kuota lengkap dengan berbagai persyaratan sejak Agustus 2007. Dengan menebar banyak duit kepada anggota staf dan orang-orang kepercayaan Jumhur, ia berharap permohonannya cepat dikabulkan.

"Tapi sampai hari ini kuota itu tak pernah kami dapatkan," katanya. Padahal setiap bulan ia harus merogoh Rp 54 juta untuk mencicil 12 kendaraan jenis ELF yang telanjur dibelinya.

Kejengkelan Syafrida belakangan kian membludak ketika tahu bahwa BNP2TKI pada 5 Maret 2008 malah memutuskan menambah lima perusahaan operator jasa angkutan. Dua dari lima perusahaan itu mendapat kuota lebih banyak dari Victory.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayanan Pemulangan TKI (AP3TKI) Erwindra, sehari kemudian, langsung menyurati Jumhur. Isinya antara lain meminta agar jumlah 21 perusahaan angkutan tak ditambah lagi. Begitu pula dengan jumlah kuota angkutan yang sudah mencapai 333 unit.

Kantor Jumhur bergeming. Merasa diperlakukan tak adil, Syafrida protes keras. Dia menuntut agar keputusan penambahan jumlah perusahaan angkutan dan kuota armada dibatalkan.

Upayanya membentur tembok. Jumlah perusahaan angkutan dan

armada di Selapajang bahkan terus bertambah. Dalam surat ketetapan yang dikeluarkan Juhur per 6 Februari 2009, jumlah operator angkutan membengkak menjadi 29 buah dengan total kuota 368 armada.

Syafrida kian meradang. Amarahnya meledak. Didampingi Direktur Operasional PT Victory Immanuel Djoeang, Syafrida akhirnya membeberkan persoalan yang dihadapinya kepada pers pada pertengahan Maret lalu. "Karena cara halus tak digubris, saya berbicara kepada pers," ujarnya. "Mudah-mudahan cara ini dapat membantu menyelesaikan persoalan kami."

TAK hanya bicara pada pers, Syafrida juga menempuh jalur hukum. Sebuah surat somasi dia kirim ke Juhur Hidayat pada 12 Maret 2008. Selain Syafrida, Hj Adjidah, Direktur Utama PT Raanan Loka Sejahtera, juga melayangkan somasi serupa.

"Seluruh kegiatan pengelolaan pelayanan di Selapajang harus bebas dari campur tangan swasta, bebas pungutan liar, baik terhadap TKI maupun perusahaan operator angkutan," tulis Syafrida dan Adjidah dalam surat somasi mereka.

Adapun yang dipersoalkan keduanya adalah penunjukan Perusahaan Umum Damri pada 4 Maret lalu sebagai perusahaan yang melayani angkutan khusus tenaga kerja Indonesia dari Lounge Terminal TKI di terminal 2D ke gedung Pendaftaran Kedatangan TKI di Selapajang Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Penunjukan itu dinilai melanggar peraturan yang telah dikeluarkan sendiri oleh BNP2TKI dua bulan sebelumnya, yaitu pada 23 Januari 2008. Sebab, dalam Bab I peraturan itu disebutkan bahwa PT Angkasa Pura II merupakan pihak yang bertugas melayani pengangkutan TKI ke Selapajang.

Yang kemudian paling membuat sewot mereka, dalam dokumen

perjanjian kerja sama antara BNP2TKI dan Damri disebutkan bahwa jasa atau biaya pengangkutan itu harus ditanggung oleh Asosiasi Perusahaan Pelayanan Pemulangan TKI (AP3TKI). Besarnya Rp 10 ribu per TKI, kecuali TKI bermasalah. Kesepakatan diteken oleh Jumhur dan Direktur Utama Perum Damri Twidjara Adji pada 11 Maret 2008.

Mereka langsung menolak beleid ini. Alasannya, dalam peraturan yang dikeluarkan BNP2TKI, jelas-jelas disebutkan bahwa pengangkutan TKI dari terminal 2D ke Selapajang gratis alias tak dipungut biaya seperak pun. Atas dasar itu, keduanya kemudian melayangkan somasi dan meminta Jumhur membatalkan kesepakatan tersebut.

Saat dimintai konfirmasinya, Jumhur berkilah anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menganggarkan sama sekali biaya pengangkutan TKI ke Selapajang. "Anggarannya nol, satu rupiah pun tidak ada," ujarnya.

Itu sebabnya, Asosiasi diminta membayar. Toh, kata Jumhur, mereka pula yang selanjutnya akan mengantarkan para TKI ke berbagai daerah asal dengan mematok tarif ratusan ribu rupiah.

Para pengusaha angkutan diminta menyisihkan Rp 10 ribu untuk Damri. "Kalau tidak ada Damri, (para TKI) tidak akan sampai ke sana (Selapajang) kan," ujar Jumhur.

Soal penunjukan Damri, menurut Jumhur, selain kualitas dan desain busnya bagus, perusahaan angkutan pelat merah itu mematok harga paling murah. Mereka bersedia dibayar Rp 10 ribu per TKI untuk jarak angkut 5-6 kilometer. Sedangkan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (Kosami) milik koperasi pegawai Angkasa Pura II mengajukan tarif hingga Rp 12.500 dan kondisi busnya kurang nyaman.

"Maaf saja, Kosami mobilnya kayak bus-bus biasa dan harganya mahal," kata Jumhur. Itu sebabnya, "Kami ambil yang pasti-pasti saja. Apalagi Damri kan BUMN, lebih enak kerja samanya."

Mendengar argumen Jumhur, giliran Manajer Kosami Bambang Akdianto yang geleng-geleng kepala. Ia menegaskan perusahaannya

tidak pernah mengajukan penawaran harga.

Ketua Umum Kosami M. Hasanuddin, kata Bambang, memang pernah mengajukan surat permohonan menjalin kerja sama pengangkutan TKI ke Selapajang pada 27 Februari 2008. Tapi, saat itu, tidak menyebut soal angka penawaran.

Permohonan diajukan dengan mempertimbangkan jejak rekam Kosami, yang telah berpengalaman menangani angkutan TKI dari terminal II Bandara Soekarno-Hatta sejak 1999. "Surat itu tak pernah direspons," ujar Bambang, "tiba-tiba pengelolaan diserahkan ke Damri."

Menurut Bambang, saat Kosami mengangkut sekitar 800 TKI dari terminal II ke terminal III, yang masih di lingkungan bandara dengan jarak sekitar dua kilometer, biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh Angkasa Pura II. "Angkasa membayar kami Rp 148 juta per bulan untuk empat bus yang dioperasikan," ujarnya.

Ketika ditanyakan soal kerja sama antara BNP2TKI dan Damri serta sudah proporsional kah biaya yang diberikan kepada Damri dibandingkan dengan jarak tempuh pengangkutan TKI, Bambang menolak berkomentar. "Itu urusan internal mereka, tak etis kami mengomentari," ujarnya menutup pembicaraan.

SERANGAN balik atas tudingan Syafrida datang dari Buche Rachman dan Syawal. Ketika dihubungi *Tempo* akhir Maret lalu, keduanya menilai pengakuan Syafrida soal adanya suap kepada mereka, sangat tidak masuk akal. Alasannya, masalah kuota angkutan merupakan wewenang penuh Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat. "Jadi mau kasih uang berapa pun ke saya, izin penambahan kuota tak akan keluar," ujar Buche, Kamis pekan lalu.

Ia pun menegaskan, andai setiap permintaan penambahan kuota

dikabulkan, akan terjadi rebutan penumpang antarperusahaan angkutan. Sebab, jumlah TKI dari luar negeri yang tiba di Selapajang per hari rata-rata cuma 800 orang.

Menurut pengakuannya, keterlibatannya dalam urusan pemulangan TKI dari luar negeri pun semata-mata karena mendapat penugasan dari instansinya, yaitu Badan Intelijen Negara.

Jabatannya sebagai Kepala Subdirektorat Pemulangan TKI Luar Negeri BNP2TKI diembannya sejak Mei 2007. Tapi 11 bulan kemudian, ia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok dengan iklim birokrasi di Selapajang. "Saya mundur sama sekali," ujarnya, "dan tak terkait dengan isu duit."

Reaksi lebih galak datang dari Syawal. Ia mengancam akan menuntut balik Syafrida karena dianggap telah memfitnahnya. Dia mengaku pernah dimintai tolong untuk membantu memfasilitasi penambahan kuota armada. Tapi hal itu tak mungkin dipenuhinya karena ia cuma anggota staf di bagian protokoler. "Lantas dia lempar fitnah," katanya. "Saya tuntutan balik dia kalau begitu!"

Anehnya, nada berbeda disampaikan Syawal kepada Syafrida pada 1 April lalu. Siang itu, ketika *Tempo* kembali menemui Syafrida untuk mengkonfirmasi ulang semua sanggahan itu, ia langsung menelepon Syawal dan sengaja membuka pengeras suara dari telepon selulernya.

Kepada Syafrida, Syawal justru menjanjikan bahwa jumlah kuota yang diminta Syafrida akan segera keluar setelah ada salinan putusan Mahkamah Agung soal uji materi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2008.

+ *"Insya Allah setelah salinan MA keluar, kuota ibu juga bisa keluar."*

- *"Ah, saya sudah bosan dengar janji. Begini saja, sebagai itikad baik, tolong semua uang itu dikembalikan ke saya."*

+ "Saya harus berembuk dengan Dody dan Hendra untuk mengembalikan uang. Tapi saya harapkan juga ibu membersihkan nama baik kami pada seluruh wartawan."

Tampaknya Syawal tak sadar percakapannya diperdengarkan kepada wartawan.

Lantas, apa kata Jumhur soal gonjang-ganjing anak buahnya itu? Ketika diwawancarai pada akhir Maret lalu, ia mengaku anak buahnya memang kerap diisukan menerima uang dari mitra kerjanya.

Ia pun berjanji akan langsung memecat mereka kalau memang ada bukti-bukti kuat bahwa anak buahnya telah meminta atau menerima uang. Bukan sekadar meramaikannya ke media massa. "Kalau lapor ke pers, itu namanya *negative campaign*," ujarnya.

Jika semua sudah cuci tangan macam ini, tampaknya tidak ada pilihan lain: Komisi Pemberantasan Korupsi ada baiknya segera turun tangan. (*)

Jumhur Hidayat: Semua Orang Bisa Menjual Saya

SEJAK dilantik sebagai pemimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada 11 Januari 2007, M. Jumhur Hidayat mengklaim telah melakukan sejumlah gebrakan untuk memperbaiki nasib tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Namun, gara-gara rekomendasinya kepada Yayasan Persada Nusantara dan PT Kosindo, ia kini ikut terbelit urusan kasus dugaan penipuan terhadap ratusan calon tenaga kerja Indonesia ke Korea. Lelaki yang biasa disapa Dince itu memberikan penjelasan kepada Tempo.

Apa yang sudah Anda lakukan selama memimpin BNP2TKI?

Dari kajian atas berbagai persoalan terkait dengan TKI, saya simpulkan telah terjadi eksploitasi sistematis terhadap tenaga kerja sejak di dalam hingga di luar negeri. Dari mengedukasi, merekrut, memeriksa kesehatan, melatih, sampai berada di luar negeri. Semua menjadi sistem yang mengeksploitasi mereka. Ini dibiarkan oleh negara selama puluhan tahun. Semua itu saya benahi satu-satu.

Contoh konkretnya?

Gaji TKI di Timur Tengah selama 20 tahun lebih tidak pernah naik, cuma 600 riyal per bulan. Mereka beralih, karena harga air minum kemasan maupun rokok di Arab Saudi sejak 1980-an hingga sekarang tetap 1 dan 5 riyal. Jadi tidak ada inflasi. Kedengarannya logis. Tapi saya ini ibarat buaya yang tentu lebih canggih dari kadal. Saya katakan kepada mereka, coba cek pendapatan per kapita masyarakat Saudi dibanding 20 tahun lalu. Akhirnya, sejak 2007 upah TKI naik menjadi 800 riyal. Di Singapura, naik dari Sin\$ 280 jadi Sin\$ 350 per bulan.

Perbaikan internal?

Pemeriksaan kesehatan calon TKI yang terjadi selama ini adalah jual-beli sertifikat. Norma-norma dari Departemen Kesehatan dilanggar. Untuk mengatasinya, kami pakai sistem sidik jari, sehingga mereka tidak bisa lagi main-main.

Juga soal pelatihan. Yang datang ke balai latihan kerja itu sebelumnya bukan orangnya, cuma daftar nama, lalu dicap. Secara formalitas, orang itu dinyatakan sudah dilatih. Padahal dia belum dilatih. Puluhan ribu orang setiap bulan diberangkatkan ke luar negeri tanpa dilatih secara layak. Sekarang 50 persen Balai swasta

saya nyatakan tidak boleh beroperasi sebelum memenuhi standar pemerintah.

Semua gebrakan itu menimbulkan perlawanan luar biasa. Mereka menghantam saya dari belakang, menolak fungsi BNP2TKI lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2008. Saya tidak boleh lagi bersentuhan dengan penyalur jasa TKI dan hanya mengurus TKI yang masuk dalam skema kerja sama antarpemerintah. Padahal jumlah <I>G to G<I> ke Korea dan Jepang cuma 30 ribu.

Kalau sudah G to G, seperti Korea, bukankah swasta tak boleh ikut?

Dengan Korea itu sekarang memang kerja sama G to G. Tapi Korea juga memiliki sistem lain, non-G to G, apabila TKI-nya masuk kategori terlatih. TKI yang dikirim ke Korea dengan skema G to G, dalam tanda kutip, yang masuk kategori unskilled atau semi-skilled. Mereka disyaratkan minimal lulusan SMP, bisa berbahasa Korea, dan bisa berangkat ke sana. Nah, kalau sekarang mereka butuh suster atau perawat, welder atau tukang las, yang sifatnya skilled atau high skilled, itu tidak termasuk dalam sistem ini (non-G to G).

Jadi, tidak termasuk G to G?

Ya. Ada istilahnya visa E-7. Ini yang merupakan peluang untuk kami dorong.

Apa dasarnya?

Itu aturan internal di Korea. Kalau, misalnya, di sana butuh tenaga konstruksi, dia boleh meminta, tapi dapat endorsement (dorongan) dari Departemen Pekerjaan Umum Korea. Kalau butuh suster, dia harus dapat persetujuan dari Departemen Kesehatan di sana. Jadi, kalau ada yang berminat sih, saya senang, akan saya dorong.

Itu sebabnya Anda memberi rekomendasi kepada PT Kosindo?

Jadi begini, saya mendorong siapa pun yang mau. Semua orang bisa menjual saya. Maaf, ya, Anda duduk bersebelahan sama saya di hadapan calon TKI ke Korea. Kemudian kita berpisah. Anda pergi ke dia, minta Rp 25 juta per kepala. Ada 1.000 orang atau 100 orang. Dalam 1 kali 24 jam, Anda pasti dikasih (uang).

Tanggung jawab BNP2TKI jika ada yang tertipu?

Oh, kami tangkap. Begitu dapat kabar, langsung kami kejar bersama polisi dan kami tangkap.

Tapi korban Kosindo melapor ke polisi karena tak pernah direspons BNP2TKI?

Hati-hati. Itu kami sudah siap tangkap. Tapi begitu kami mau tangkap, TKI-nya tidak mau. Karena dia mau uangnya kembali dulu. (*)

Pemenang I kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah ini pernah dipublikasikan di Koran Tempo pada tanggal 7 – 9 April 2009



Si Tono Pencetak Batubata Pekerja Anak

Oleh. Raden Yusuf Hidayat

AHMAD Sutono (9), siswa kelas I Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ikhlas, Mangsang Kavling, Kecamatan Sebeduk, Batam, bersama ibunya Darwati (48, kiri) menjadi buruh pencetak batu bata di Mangsang Kebun. Sutono sudah menjadi buruh anak sejak tiga tahun lalu. Meski sudah ada sekolah yang mau menerimanya, namun ia tetap bekerja sepulang sekolah untuk membantu orangtuanya membiayai sekolahnya yang mahal. Tampak Sutono mencetak batu bata secara manual, Sabtu (31/10) siang. Buruh informal seperti mereka tidak tersentuh layanan jaminan kesejahteraan social atau asuransi.

Pemenang II kategori foto "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Foto sudah pernah dipublikasikan di Batam Pos tanggal 1 November 2009



BURUH ANAK

Sekolah Kosong di Soe

*Oleh. Ridwan Max Sijabat and Yemris Fointuna
(THE JAKARTA POST)*

Krisis perekonomian global menghantam keras Nusa Tenggara Timur. Keluarga-keluarga miskin menarik anak-anak mereka dari sekolah dan menyuruh mereka bekerja demi menambah penghasilan keluarga.

MELKY Litbani tak mau menyalahkan siapapun dan apapun. Wajahnya yang pucat dan tirus, tubuhnya ringkih, seakan menyerah pada nasib yang membuatnya terdampar jadi pendorong gerobak, di pasar tradisional Kasih di kecamatan Oepura, Nusa Tenggara Timur. Usia belum lagi menginjak belasan tahun.

Sejak pukul 4 pagi, jebolan SD Negeri dari sebuah desa yang terpencil di Soe, Timor Tengah Selatan itu, sudah siap di pasar dengan gerobak sewaanannya. Gerobak itu ia gunakan untuk membantu para pedagang dan pembeli membawa barang-barang di pasar. Dengan mengenakan kaos dan celana pendek, tanpa alas kaki, ia bekerja tanpa lelah mulai pagi buta sampai jauh petang. Rata-rata sehari, dia hanya membawa pulang Rp 10 ribu, setelah dipotong sewa gerobaknya. Setiap kali gerobaknya dipakai pembeli, Melky mendapat upah Rp 2 ribu.

Dia baru mulai bekerja di sana, sejak dua bulan lalu. Kini dia sudah mulai terbiasa dengan kerasnya kehidupan jalanan, dan aturan main hidup di pasar. Setelah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya

yang baru, ia --seperti juga teman-teman sebayanya-- berharap bisa menabung sekitar Rp 200 ribu per bulan untuk dikirim ke keluarganya di kampung halaman.

Melky, putra bungsu Petrus Litbani dan Laura, keluarga peternak di Soe, terpaksa berhenti sekolah di tengah jalan karena sang ayah meminta ia keluar dari sekolah. Petrus mengirim anaknya pergi ke kota bersama teman-teman sebayanya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi menyokong kehidupan keluarga.

Melky hanya satu dari belasan pekerja anak yang menyambung hidup di pasar. Para pekerja anak ini tampak menonjol di antara para penarik gerobak yang berusia dewasa.

Salmon Artauro, supir ojek yang mengelola 12 anak penarik gerobak ini, berdalih bahwa perbuatannya mempekerjakan anak di kota sudah sejjin orang tua mereka. Anak-anak ini, kata Salmon, tak punya pekerjaan di kampung.

Seperti Melky, Immanuel Holo, anak laki-laki 9 tahun dari sebuah keluarga miskin di Kodi, kabupaten Sumba Barat Daya, bekerja lebih dari 12 jam dalam sehari sebagai loper koran untuk menyokong kehidupan keluarga di kampung. Dia bekerja di depan kediaman gubernur yang baru dan mewah.

Immanuel lebih sering dipanggil "Nuel" oleh sesama rekannya loper koran. Ia dibayar Rp 8 ribu untuk setiap 10 lembar koran yang ia jual. Setiap harinya ia membawa pulang Rp 16 ribu – 20 ribu. Sebulan ia membawa pulang Rp 100 ribu untuk keluarganya. Di kota ia menghadapi kerasnya kehidupan bersama dua kakak laki-lakinya di sebuah kamar kos-kosan.

Nuel berhenti sekolah ketika ia duduk di kelas tiga sekolah dasar. Setelah diminta orang tua untuk berhenti sekolah, ia pun pindah ke kota.

"Ayah saya meminta saya berhenti sekolah karena kami keluarga yang tak berpunya. Orang tua saya tidak mampu beli seragam dan

peralatan sekolah. Karena itu, saya diminta bergabung bersama kakak-kakak yang lebih tua untuk bekerja di kota. Saya ingin tetap bersekolah, tetapi tak ada yang mendukung saya,” katanya pada *The Jakarta Post*.

Ia tampaknya mensyukuri benar pekerjaannya yang baru. Ini kesempatan pertama bagi dirinya untuk punya uang sendiri. Sekarang ia mampu menyambung hidupnya sendiri seraya menyokong kehidupan keluarga besarnya di kampung halaman.

Nuel mengakui sekarang dia harus berusaha keras, beradaptasi dengan kehidupan jalanan. Tak jarang, dia terlibat dalam perkelahian dan pertikaian dengan sesama looper.

Sebelum pulang larut malam setiap harinya, bocah-bocah looper koran ini hampir selalu bergabung dengan pria-pria dewasa desa itu, bercengkerama di tempat biliar di sudut Pasar Tradisional Kasih. Di tempat ini, anak-anak bebas merokok, minum minuman keras dan main berbagai bentuk perjudian.

Petrus Dangatobo, jebolan kelas 5 SD berusia 11 tahun dari Sumba Barat Daya pindah ke kota pada Desember 2008. Tujuannya sama dengan Nuel dan Melky: menyokong kehidupan dan perekonomian keluarga. Ia bekerja sebagai looper koran dengan penghasilan harian yang tak pasti. Tapi, dia mengaku menikmati profesi baru ini. Profesi ini memberinya penghasilan, bersama-sama ratusan warga desanya yang juga bekerja di kota.

Nasib para remaja dari komunitas nelayan dan peternak di Kelapa Lima, Alak dan Maluafa – tiga dari empat kabupaten di kota Kupang, NTT, tak jauh berbeda. Mereka juga putus sekolah di tingkat SMP. Di semester kedua tahun 2008, di usia yang terbilang dini, mereka telah masuk ke dunia kerja --bersama dan dengan restu orang tua mereka-- karena desakan kondisi keuangan.

Azaro Lapanasa, nelayan berusia 45 tahun dan ayah tujuh anak berusia sekolah, mengaku terus terang kalau ia meminta tiga anaknya

keluar dari SMP sejak November lalu untuk menemaninya mencari ikan setiap malam.

"Saya dan istri tidak punya pilihan lain selain meminta tiga anak kami berhenti sekolah. Pendidikan memang penting, tetapi makanan lebih penting lagi untuk bertahan hidup," katanya.

Keluarga lain punya pengakuan mirip. Hasan Rusli, 45, dan istrinya Salamah, 44, yang tinggal di daerah pesisir Kupang, mengaku mereka terpukul dengan tingginya kenaikan harga beras dari Rp 3.800,- menjadi Rp 8 ribu per kilogram akhir Agustus lalu. Harga minyak goreng juga meroket.

"Sepanjang masa sulit ini, suami saya tidak bisa melaut karena harga bensin meningkat dan minyak tanah langka. Bagaimana kami bisa membiayai pendidikan anak-anak kami sementara kami tak punya uang untuk beli beras dan bahan-bahan pokok lainnya untuk bertahan hidup?" tanya Salamah, yang menjajakan ikan di pinggir jalan bersama putrinya untuk membantu membayar hutang keluarga kepada rentenir.

Meroketnya biaya bahan-bahan pokok – terutama beras – juga meningkatnya biaya bahan bakar minyak, tingginya tingkat pengangguran dan kekeringan parah yang berkepanjangan antara bulan Agustus sampai Desember 2008, menghantam keras keluarga-keluarga miskin di daerah miskin dan pinggiran kota di NTT.

"Tingginya harga makanan, biaya bahan bakar dan transportasi, hutang yang harus dilunasi dan kehilangan lapangan pekerjaan adalah empat kesulitan utama di tahun lalu yang menyebabkan banyak orang tua terpaksa menyuruh anak-anak mereka berhenti sekolah dan meminta mereka bekerja demi menyokong kehidupan keluarga," kata Bupati Maluafa, Andreas Dominggos.

Ia menambahkan bahwa belasan anak usia sekolah di Maluafa dan sejumlah kabupaten di sekitarnya, terancam putus sekolah dan mulai bekerja karena keluarga mereka tak lagi mampu membiayai sekolah

mereka. Krisis ekonomi global yang berkepanjangan selama dua tahun terakhir ini, mulai memakan korban.

SEKALIPUN ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kenaikan anggaran pendidikan, pemerintah daerah tampaknya terlambat merespon persoalan penting soal melonjaknya jumlah pekerja anak di provinsi paling tertinggal di Indonesia, Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah kota Kupang sendiri mengaku bahwa mereka mengetahui adanya gelombang kenaikan jumlah pekerja anak dari kabupaten terpencil dan maraknya buruh anak di kota-kota besar, sejak sembilan bulan terakhir. Meskipun demikian, pemerintah tidak sanggup untuk memaksa mereka agar tetap bersekolah, akibat keterbatasan anggaran.

“Pemerintah kota telah memantau persoalan pekerja anak dan tingginya angka putus sekolah di kota besar sejak Juni lalu. Meskipun demikian, kami tidak punya kewenangan untuk mencegah siapapun, termasuk pekerja anak, untuk pindah ke kota besar demi mencari pekerjaan. Kita pun tak bisa dipersalahkan untuk soal itu,” kata Enos Ndarapoka, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, kepada *The Jakarta Post* di kantornya baru-baru ini.

Ia menambahkan bahwa tahun-tahun terakhir selalu ada ratusan anak yang pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Hal ini karena adanya tekanan keuangan dari keluarga mereka yang miskin di kampung yang berada nun di daerah terpencil. Para buruh anak ini bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan pekerjaan rumah tangga. Seringkali mereka sama sekali tak punya posisi tawar. Walhasil, seringkali mereka dibayar murah untuk mengerjakan beban pekerjaan yang berat.

Enos juga mengakui bahwa ribuan anak di kota dan daerah

pinggiran kota di NTT mulai bekerja sejak usia belia. Hal ini karena mereka terpaksa putus sekolah lantaran krisis pangan dan bahan bakar yang melanda provinsi tersebut di awal tahun lalu.

“Banyak orang tua memutuskan untuk tidak lagi menyuruh anak mereka bersekolah. Mereka lebih memilih mereka bekerja untuk membantu menunjang perekonomian keluarga. Hal ini bukanlah sekedar strategi penyelesaian masalah sementara, tetapi ini merupakan langkah terakhir demi bertahan hidup dari krisis berkepanjangan,” kata Enos menawarkan analisa. Di kalangan keluarga miskin, kata Enos, ada indikasi mereka telah menanggalkan harapan akan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka melalui pendidikan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Januari 2009 lalu, oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTT menunjukkan bahwa umumnya pekerja anak datang dari keluarga-keluarga miskin yang tinggal di wilayah-wilayah rentan di kota maupun di daerah pinggiran kota. Mereka menyambung hidup dengan cara mencari ikan, bercocok tanam, menjual hasil bumi dan bekerja sebagai buruh kasar. Padahal biaya hidup di kota sangatlah tinggi karena barang-barang konsumsi, terutama bahan-bahan pokok, dibeli dari Jawa dan Sulawesi.

Enos juga mengkritik program pendidikan gratis yang menurutnya sebatas konsep dan janji-janji politik dan tidak benar-benar bebas biaya. Sekalipun ada dukungan finansial dari BOS, komite sekolah --yang mewakili orang tua dan manajemen sekolah-- tetap menerapkan pungutan tambahan pada para pelajar untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler serta membayar gaji staf pengajar tidak tetap. Sebagai tambahan, orang tua pun tetap harus membeli seragam, buku dan sepatu untuk anak mereka serta mengeluarkan biaya transportasi dari dan ke sekolah.

Ditemui di kantornya, awal Maret lalu, Enos mengaku lembaganya sudah bekerjasama dengan ILO Wilayah Timur dan lembaga-lembaga internasional lainnya, untuk meluncurkan program rumah singgah. Di

rumah singgah ini, tersedia pelatihan khusus bagi mereka yang putus sekolah. Tetapi sayangnya kapasitas yang tersedia sangat terbatas. Sejauh ini hanya 30 anak yang bisa ditampung dalam rumah singgah ini. Padahal, jumlah mereka yang putus sekolah di kota-kota besar di NTT mencapai angka ratusan orang.

Ketika dimintai konfirmasi, Dinas Pendidikan Kupang, NTT, membantah semua tudingan rekan sejawatnya. Dinas ini menilai selama lima tahun terakhir, angka kehadiran siswa SMA di sekolah mencapai hampir 98 persen berkat adanya peningkatan anggaran pendidikan dan BOS.

"Angka putus sekolah tingkat SMP tahun lalu hanyalah 0.18 persen. Tetapi hanya sebagian kecil lulusan SD yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah akibat krisis berkepanjangan yang melanda provinsi ini," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kupang, Yaved Leo.

Pemerintah daerah meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 124.5 milyar di tahun 2007 sampai Rp 168.7 milyar di tahun 2008 dan Rp 162.8 milyar (yang harus direvisi) di tahun 2009, sementara BOS meningkat dari Rp 13.3 milyar di tahun 2005 dan tahun 2006 menjadi Rp 15 milyar di tahun 2007, Rp 15.5 milyar di 2008 dan Rp 16 milyar di tahun 2009, mencakup 82.000 pelajar di 152 SD dan SMP yang ada di kota.

Yaved berkata bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan kepada pemerintah untuk melipat duakan anggaran untuk membantu keluarga-keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap bersekolah. Tetapi Pemerintah tidak segera mengeluarkan respon.

"Kurang tanggapnya pemerintah membuat pemerintah kabupaten terpencil enggan untuk menghentikan warganya yang pindah untuk mencari pekerjaan ke kota besar, termasuk anak-anak," katanya.

Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan terperosok makin dalam di tengah pusaran krisis tahun ini. Yang membuat situasi makin runyam, pemerintah dinilai tak punya rencana aksi maupun tindakan nyata apapun untuk menghadapi krisis pangan terburuk yang menghantam provinsi ini sejak dua tahun terakhir.

"Tak hanya angka putus sekolah dan pekerja anak yang akan meningkat, tetapi juga jumlah keluarga rentan dan pengangguran. Hal ini karena krisis pangan masih menghantui dan pertumbuhan ekonomi tampaknya hanya akan mencapai angka 4,5 persen, merosot dari 6,1 persen pada tahun 2008. Jangan lupa bahwa hal ini terjadi di tengah-tengah menurunnya ekonomi global dan menjelang pemilihan umum," demikian disampaikan oleh kepala Pusat Kajian Sosial dan Reformasi Politik dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Yanuarius Kolibau, kepada *The Jakarta Post*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pusat kajian ini, Yanuarius menyatakan kelaparan dan kekurangan gizi masih akan menghantui NTT. Tingkat kemiskinan diperkirakan mencapai 30 persen, atau 1.3 juta orang pada 2009 ini, naik dari 27 persen di tahun 2008. Sedangkan tingkat pengangguran diperkirakan mencapai lima persen, meningkat dibandingkan dengan angka 3,7 persen tahun lalu.

Yanuarius juga menjelaskan bahwa kemiskinan yang meluas ini akan berdampak pada 27 persen masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan di NTT, serta berdampak juga pada 25 persen warga di perkotaan. Sampai saat ini, belum ada tindakan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

"Angka putus sekolah diperkirakan akan naik sampai 50 ribu tahun ini, dari 40 ribu di tahun 2008. Hal ini karena banyak orang tua dari keluarga yang rentan menyuruh anaknya untuk bekerja saja," kata Yanuarius. Kenaikan anggaran pendidikan, kata dia, tidak akan memberikan kontribusi berarti dalam mempertahankan angka kehadiran siswa di sekolah. Hal ini karena pemerintah belum juga

mengambil langkah konkret untuk meningkatkan dana yang dialirkan ke sekolah (*school feeding funds*) maupun menyusun rencana aksi untuk memberdayakan keluarga-keluarga rentan.

Yanuarius mengkritik pemerintah yang memfokuskan perhatian pada pembentukan kabupaten baru di seputar kepulauan Nusa Tenggara. Menurutnya, kebutuhan masyarakat adalah infrastruktur seperti jaringan jalan raya untuk mengakses daerah-daerah yang jauh dan terpencil, sistem pengairan untuk menghidupkan kembali sektor pertanian dan membuat masyarakat memiliki cadangan pangan yang memadai, juga menggali sumber daya kelautan yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Menurut Yanuarius, pemerintah seharusnya meningkatkan dan memperluas kerjasama yang sudah dibangun dengan negara-negara asing, juga lembaga-lembaga internasional seperti FAO, UNICEF dan ILO. Kerjasama ini dimanfaatkan untuk merancang rencana aksi untuk mengatasi krisis pangan dan pengangguran. Hal ini juga bisa digunakan untuk memberdayakan keluarga-keluarga yang rentan serta mempertahankan tingkat kehadiran siswa sekolah di tingkat SD dan sekolah menengah.

Survei lain yang dilakukan oleh World Food Programme di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi), Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Timur, selama bulan Agustus sampai November 2008. Survei ini mengungkapkan bahwa empat permasalahan terbesar yang memiliki dampak besar pada rumah tangga di wilayah pedesaan adalah tingginya harga bahan pangan, bahan bakar/transportasi, pelunasan hutang dan kehilangan lapangan pekerjaan.

Sekalipun harga bahan pangan dan bahan-bahan penting non-pangan berhasil diturunkan atau dijaga stabilitasnya sejak bulan September 2008, belum ada perbaikan yang dilakukan dalam hal konsumsi pangan maupun *food expenditure*. Bahkan konsumsi pangan

di wilayah pedesaan memburuk sejak bulan Oktober.

Berdasarkan survei tersebut, 35 persen rumah tangga di wilayah pedesaan, dan 25 persen di wilayah perkotaan cenderung terancam dan rencan dalam hal pangan. Rumah tangga yang disurvei mencakup buruh petani harian, penjual produk-produk pertanian dan kerajinan, serta keluarga dari para buruh migran.

Untuk dapat bertahan, mereka mengurangi frekuensi makan sehari-hari ataupun mengurangi jatah masakan yang mereka makan. Sebagian dari keluarga rentan ini tak termasuk ke dalam kelompok yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai, pelayanan kesehatan gratis maupun program subsidi beras dari pemerintah.

Sekalipun angka kehadiran di bangku SMA tinggi, banyak keluarga rentan di wilayah perkotaan dan pedesaan sudah mulai menyuruh anak mereka cepat-cepat berhenti sekolah. Anak-anak ini diminta bekerja untuk mencari tambahan penghasilan demi mendukung perekonomian keluarga. Tinggallah bangku-bangku sekolah yang merana sendirian, di Desa Soe. (*)

Pemenang II kategori cetak "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Naskah sudah pernah dipublikasikan di The Jakarta Post pada 16 Maret 2009.

Living Merapi

Oleh. Roni Zakaria



PERTENGAHAN 2006, petaka itu tiba. Letusan Gunung Merapi memaksa penduduk yang tinggal di lereng mengungsi menyelamatkan diri dari amarah sang Gunung. Amarah yang kesekian kalinya.

Dua setengah tahun sudah deru dan debu berlalu. Saat ketenangan menggantikan amarah, berkah kembali terasa pada kehidupan penduduk di sekitar lereng Gunung Merapi. Lahar aktif yang mengalir secara konstan ke bukit di sekitar lereng adalah salah satunya. Lahar aktif dari gunung berapi menghasilkan bebatuan dan pasir berkualitas tinggi. Banyak penduduk di desa sekitar lereng Merapi menggantungkan hidup mereka sebagai penambang pasir dan batu.

Mereka tidak sekadar mencari nafkah, tapi juga secara tak langsung menjaga keseimbangan. Tanpa penambang dan aliran lava aktif yang terus-menerus mengalir, bukit di lereng Merapi akan tenggelam dalam lahar dingin. Inilah cara penduduk gunung Merapi hidup dengan alam. Harmonis dan seimbang. Hidup dengan Merapi.

Hujan Batu Buruh Kita Kumpulan Liputan Perburuhan





Nominasi kategori foto "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Foto sudah pernah dipublikasikan di Koran Tempo tanggal 10 Agustus 2008



Fashion Victims

Oleh. Afriadi Hikmal



DERETAN pria dengan kepala menunduk sedang bekerja dengan teliti di belakang mesin masing-masing di pabrik garmen Al-Mia, Jakarta. Mereka meninggalkan keluarganya dan pindah ke kota besar untuk mencari apa yang disebut Impian Jakarta. Akan tetapi, mereka menemukan dirinya yang berpenghasilan Rp 300.000 sampai Rp 500.000 per minggu, makan di sebuah toko kecil di samping pabrik dan beristirahat di lantai atas asrama yang sangat sederhana pada akhir hari kerja. Bagi mereka, impian Jakarta adalah sesuatu yang sangat jauh.

Hujan Batu Buruh Kita Kumpulan Liputan Perburuhan







Pemenang I kategori foto "Penghargaan Jurnalistik untuk Liputan Isu Perburuhan 2009". Foto sudah pernah dipublikasikan di Jakarta Globe edisi 22/23 November 2008